

RENCANA STRATEGIS

2017 - 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SINTANG**

2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-NYA maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, disusun sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tentang rencana kegiatan dalam rangka penerapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) tahunan, juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan di bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan harapan agar Rencana Strategis (Renstra) dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang pada khususnya, dan Visi Misi Kabupaten Sintang pada umumnya.

**Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang**

**H. SUDIRMAN, S.Sos. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611216 198403 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	7
2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	17
2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	49
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB IV TUJUAN, SASARAN, VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	73
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	76
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	80

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	86
5.1	Rencana Program dan Kegiatan	86
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD	106
BAB VII	PENUTUP	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pilar utama pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang, yang memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar melalui nilai tambah bagi Pendapatan Daerah dan penyerapan lapangan kerja. Selain itu juga berperan dalam transformasi kultural menuju modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing dalam era globalisasi ekonomi. Di tingkat masyarakat, subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah banyak memberikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Besarnya kontribusi tersebut dapat dilihat dalam pertumbuhan ekonomi secara riil. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri.

Pada tahun 2013, ketiga sektor tersebut peranannya mencapai 70,63 persen. Walaupun gabungan peranan ketiga sektor tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2012, namun peranan ketiga sektor tersebut tetap merupakan sektor pemimpin (*leading sector*) bagi pembentukan PDRB Kabupaten Sintang. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu 33,85 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,13 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 9,65 persen.

Kecenderungan di masa mendatang subsektor ini akan terus menentukan struktur ekonomi daerah seiring dengan perkembangan Kabupaten Sintang yang cenderung menguat pada sektor tersier (perdagangan dan jasa) dan sektor sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) yang merupakan ciri kabupaten yang berkembang. Peran subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan semakin bertambah dengan terus digalinya kompetensi inti daerah yang akan memunculkan keunggulan dan potensi ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi masyarakat.

Meskipun berkontribusi penting dalam perekonomian daerah, subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, subsektor masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bisa menghambat perkembangannya ke depan, antara lain menyangkut kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, aplikasi teknologi, regulasi dan infrastruktur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dalam urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran strategis dalam memecahkan permasalahan tersebut sekaligus menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, dan *empowerment* (pemberdayaan). Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah semakin penting bila dikaitkan dengan Visi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021” dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Implementasi peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka itu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk menjawab bagaimana setiap isu strategis terkait subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dipecahkan. Melalui Renstra, peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik akan lebih jelas, yaitu terlihat pada visi, misi dan nilai-nilai yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan tugas. Visi, misi, dan nilai tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga renstra akan lebih operasional.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana pembangunan daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Sintang, dan sinkronisasi terhadap rencana pembangunan lembaga terkait sehingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Strategis merupakan perwujudan dari RPJMD yang akan dijadwalkan ke dalam RKPD dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-400 dan Nomor: 132.61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan 2016-2021;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra:

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai dan strategi yang digunakan untuk tercapainya tujuan tersebut oleh SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021).
2. Memberikan fokus (penajaman) dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam dimensi waktu 5 (lima) tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

1. Adanya panduan atau pedoman kerja bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan beserta seluruh staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan berjalan efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia.
5. Agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap program atau kegiatan menjadi lebih jelas dan terukur.
6. Memudahkan pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing bidang dan sekretariat serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal.
7. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan SKPD lainnya, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat tentang latar Belakang Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini berisikan tentang permasalahan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga merupakan isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini mengungkapkan harapan mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 agar **Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Maju dan Mandiri.**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Sintang dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang maka Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- c. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
- f. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- g. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- l. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- m. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
- n. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
- o. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

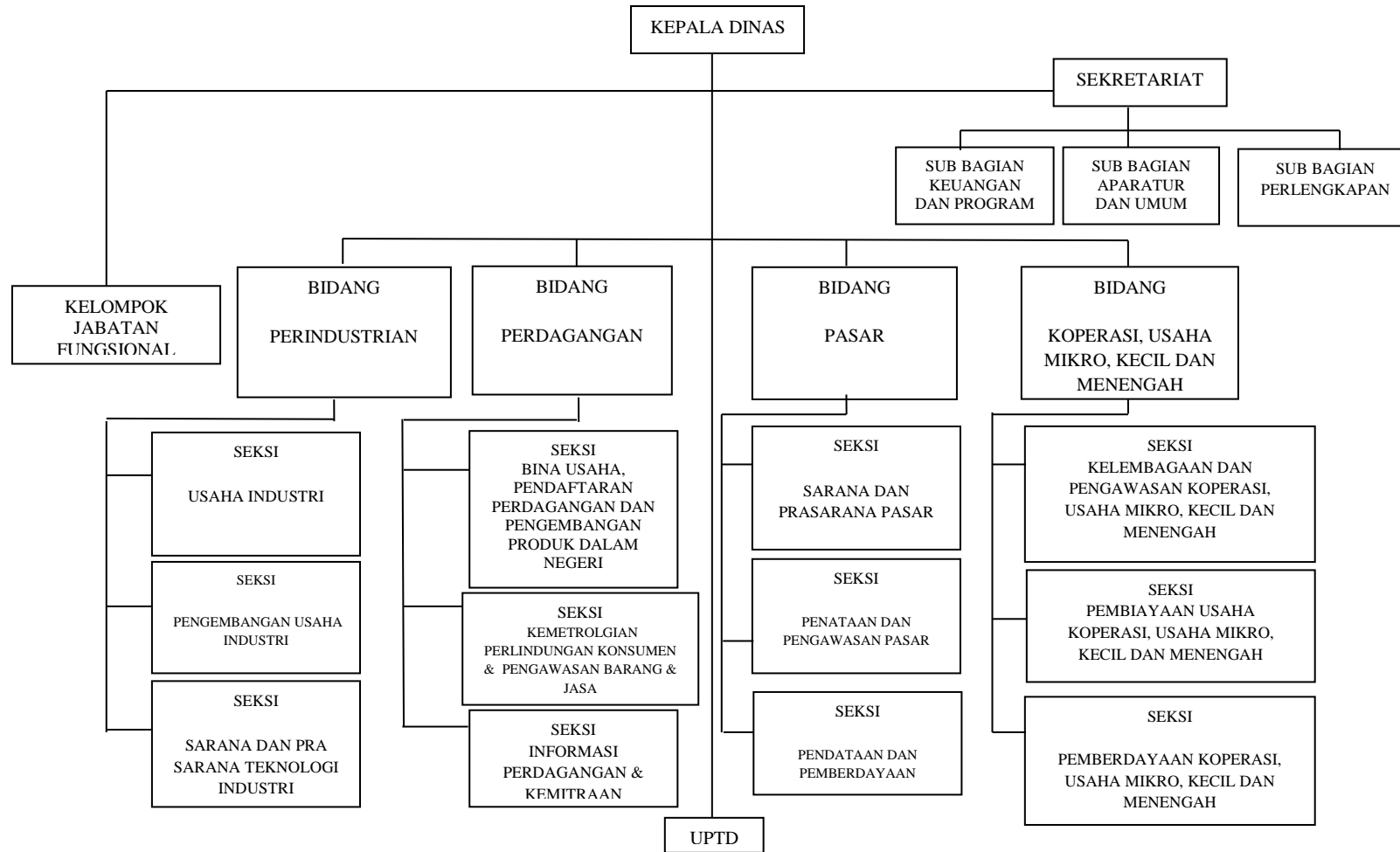
2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan,
- c. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Usaha Industri, Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Seksi Sarana dan Prasarana teknologi Industri,
- d. Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri, Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar,
- e. Bidang Pasar membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar dan Seksi Pendataan dan Pemberdayaan,

- f. Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolagian
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan tentang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
 - b. Penyampaian program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati.
 - c. Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - d. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - f. Penetapan kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - g. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
 - h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.
 - i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.
 - j. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bupati.
 - k. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - l. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
 - m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- b. Penghimpun, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Penghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 - f. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - g. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - i. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub Bagian Keuangan dan Program, sub Bagian Aparatur dan Umum dan sub Bagian Perlengkapan.
 - j. Perindustrian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi usaha industri, pengembangan usaha industri, sarana dan prasarana industri.
- Adapun fungsi bidang Perindustrian adalah :
- a. Penyusunan Petunjuk teknis Operasional pengelolaan perindustrian.
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri.
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri

- d. Pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang industri, peralatan, bahan baku, dan penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
 - e. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan industri jangka menengah dan panjang.
 - g. Penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha industri dan mutu industri.
 - h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang industri dan rekomendasi Tanda Daftar Industri.
 - i. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
 - j. Pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana teknologi industri.
 - k. Pelaksanaan pembentukan dan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi sarana dan prasarana teknologi industri.
 - l. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi industri.
 - m. Pelaksanaan penerapan standar, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
 - n. Pelaksanaan fasilitasi dan perluasan sumber pembiayaan untuk sarana dan prasarana teknologi industri.
 - o. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis/ pelatihan penggunaan sarana dan prasarana teknologi industri.
 - p. Penyediaan fasilitasi dan keringanan tarif pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi industri khususnya pelaku usaha industri kecil.
 - q. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada seksi sarana dan prasarana teknologi industri.
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perdagangan yang meliputi bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang Perdagangan.

- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - c. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - e. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin dan rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
 - f. Pengendalian kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - g. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha niaga untuk dapat lebih berkembang khususnya untuk pedagang kecil dan informal.
 - h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan penyaluran barang.
 - i. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi dunia usaha terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
 - k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran barang beredar.
 - l. Pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha perdagangan, perdagangan jasa dan pendaftaran perusahaan.
 - m. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Sarana dan Prasarana Pasar, Penataan dan Pengawasan

Pasar, dan Pendataan dan Pemberdayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada bidang Pasar.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pasar.
 - c. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - d. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pasar.
 - e. Pelaksanaan dan penyeleggaraan urusan sarana dan prasarana pasar meliputi survey, kajian analisis, perencanaan tentang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar.
 - f. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan penataan dan pengawasan pasar meliputi ketertiban, pendaftaran, penempatan, pencabutan undi dan relokasi pasar.
 - g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pendataan dan pemberdayaan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, registrasi, pendataan dan pemungutan retribusi.
 - h. Penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - i. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - j. Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
 - k. Pengoordinasian urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
 - l. Pelaksanaan penetapan besaran retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - m. Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
 - n. Penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan retribusi pasar.
 - o. Penelitian dan penelaahaan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - p. Penyusunan laporan tahunan bidang Pasar, dan
 - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program kerja tahunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan konsultasi, penyuluhan, pendidikan, pengawasan, pengendalian kelembagaan, usaha dan fasilitasi pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Penyelenggaraan pelayanan pembentukan, fasilitasi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
- e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana, jaringan lembaga pembiayaan dan sistem penjaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f. Pemantauan pelaksanaan pengendalian kerjasama atau kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- g. Penyusunan program dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- h. Pengoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.
- i. Penyusunan pedoman, standar, norma dan kriteria pemberian izin di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem informasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- k. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- l. Perumusan dan penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada Koperasi.
- m. Penyelenggaraan fasilitasi dan memberikan dukungan dalam kerjasama antar Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan lainnya.
- n. Pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan pemeringkatan koperasi.
- o. Pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- p. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- q. Pelaksanaan pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- r. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- s. Penyusunan laporan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sampai dengan Maret 2017 berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) personil yang terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf, sedangkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan sejumlah 46 (empat puluh enam) personil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golong Ruang
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	3	1	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	7	5	12
5.	Penata (III/c)	6	1	7
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	5	9
7.	Penata Muda (III/a)	5	3	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-
9.	Pengatur (II/c)	1	1	2
10.	Pengatur Muda (II/b)	3	-	3
	Jumlah			47

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.2
Pendidikan PNS Per Golongan Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Golongan II	4	1	-	-	5
2.	Golongan III	7	1	21	7	36
3.	Golongan IV	-	-	2	4	6
	Jumlah	11	2	23	11	47

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.3
Pendidikan Pejabat Struktural Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Eselon	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Eselon II A	-	-	-	-	-
2.	Eselon II B	-	-	-	1	1
3.	Eselon III A	-	-	1	-	1
4.	Eselon III B	-	-	1	3	4
5.	Eselon IV A	1	-	8	7	16
6.	Eselon IV B	-	-	1	-	1
	Jumlah	1	-	11	11	23

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.4
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	Adum/Pim IV	12
2.	Adumla/Pim III	4
3.	Kepemimpinan Tk.II	1
	Jumlah	17

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.5
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jenis Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah
1.	Kursus Manajemen Proyek	1
2.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10
3.	Short Course Akuntansi Koperasi dan UKM	1
4.	PPNS	1
5.	Penyuluh Perindag	3
6.	Bendahara (Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD)	4
7.	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Pengelolaan Keuangan Daerah)	3
8.	Kearsipan	3
	Jumlah	26

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.6
Posisi Jabatan Struktural/Eselon Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II.B	1
2.	Sekretaris	III.A	1
3.	Kepala Bidang	III.B	4
4.	Kepala Sub Bidang / Kasi	IV.A	16
5.	Kepala Sub Bag TU	IV.B	1
	Jumlah		23

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Daftar Inventaris Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor	1 unit	-	1	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 buah	1	-	-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 buah	1	-	-
4.	Sepeda Motor	11 buah	9	2	-
5.	Komputer / Pc	8 buah	6	2	-
6.	Komputer Note Book	7 buah	5	-	2
7.	Printer	11 set	8	1	2
8.	UPS	4 buah	4	-	-
9.	Mesin Ketik	3 buah	-	-	3
10.	Meja Rapat	8 buah	8	-	-
11.	Meja Biro/Direksi	6 buah	4	2	-
12.	Meja ½ Biro	52 buah	50	-	2
13.	Kursi Direksi	9 buah	9	-	-
14.	Kursi Rapat dan Kursi	81 buah	71	10	-

	Kerja				
15.	Kursi Tamu (sofa)	4 set	4	-	-
16.	Brankas	2 buah	2	-	-
17.	Telepon	2 buah	1	-	-
18.	Faximile	2 buah	1	-	1
19.	Sound Sistem	2 buah	2	-	-
20.	Lemari Arsip	19 buah	16	3	-
21.	Rak Arsip	4 buah	4	-	-
22.	Filling Cabinet	7 buah	7	-	-
23.	AC	17 buah	11	-	6
24.	Kipas Angin	13 buah	9	3	1
25.	Televisi + Digital	1 set	1	-	-
26.	Dispenser	2 buah	2	-	-
27.	Genset	1 buah	-	1	-
28.	Mesin Potong Rumput	1 buah	-	1	-
29.	Proyektor (infocus)	1 Buah	1	-	-
30.	Handycamp	1 Buah	1	-	-
31.	TOA	1 Buah	1	-	-
32.	Tangga Almunium	2 Buah	1	-	-

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2017

2.2.3 Anggaran

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 02 tahun 2008 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Tugas Pembantuan. Anggaran dan realisasi pendanaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1
Pendanaan Kegiatan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dari Tahun 2013 s/d 2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Pagu Belanja Daerah	15.734.660.438	22.512.128.019	20.749.001.720	
	a. Belanja Tidak Langsung	3.040.816.438	3.294.965.019	3.558.966.620	
	b. Belanja langsung	12.693.844.000	19.217.163.000	17.190.035.100	
	- Dana Alokasi Umum	10.417.055.000	18.421.333.000	14.957.855.100	
	- Dana Alokasi Khusus	2.276.800.000	795.830.000	2.232.180.000	
2.	Realisasi Belanja Daerah	10.021.900.244	21.529.382.111	19.959.688.118	
	a. Belanja Tidak Langsung	2.873.737.058	2.840.391.015	3.012.529.440	
	b. Belanja langsung	7.148.163.186	18.688.991.096	16.947.158.678	
	- Dana Alokasi	4.871.363.186	17.893.161.096	14.714.978.678	

	Umum					
-	Dana	Alokasi	2.276.800.000	795.830.000	2.232.180.000	
	Khusus					

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Produk program dan kegiatan yang telah dihasilkan selama periode 2016-2021 capaian kinerja yang telah dihasil oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat terlihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2. Dimana pada Tabel 2.3.1 hasil kinerja Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari Sub bidang Perdagangan rata-rata target rencana kegiatan telah tercapai, hanya pada kegiatan pembangunan pasar di beberapa kecamatan yang belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan dengan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dan adanya pengalihan kegiatan untuk kegiatan penanganan musibah kebakaran pasar pemerintah. Pelaksanaan pembangunan pasar rakyat pembiayaan masih menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan pada kegiatan bidang Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah target rencana kegiatan juga telah tercapai dengan baik, walaupun ada di beberapa kegiatan secara kuantitas realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan akan tetapi kegiatan tersebut masih bisa dilaksanakn dengan baik seperti kegiatan pelaksanaan pelatihan.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi anggaran (Tabel 2.2.3.1) maka rata rata pencapaian realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tercapai selama lima tahun berkisar 95% – 98% dan pada tahun 2013 pencapaian hanya tereliasasi sebesar 46,76% dan sedangkan Dana Alokasi Khusus terealisasi selama lima tahun mencapai 100%. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan (TP) Disperindagkop dan UKM Kabupaten baru dipercaya untuk mengelola pada tahun 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- dan terealisasi sebesar 86,46%. Untuk rata-rata besaran Jumlah Dana Alokasi Khusus oleh Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang yang dikelola sebesar Rp. 11,029 Milyar dan Dana DAK sebesar Rp. 1,438 Milyar.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target Indikator	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						SPM	IKK	Lainya		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Perdagangan																			
1.	Tersedianya Data Prognosa Kebutuhan Pokok				Buku	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Stabilitas Harga Pupuk dan BBM				Buku	0	5	10	0	10	0	0	10	0	10	-	0%	100%	-	100%
3.	Tersedianya Laporan Pengawasan				Buku	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya data Penggunaan Alat UTTP				Buku	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	200%
5.	Terlaksananya Pengendalian Harga				Kali	2	2	3	4	3	2	0	3	4	3	100%	0%	100%	100%	100%

	melalui OP																			
6.	Terbangunnya Kios Pasar di Kec. Ambalau				Kios	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	100%	-	-	-	0%
7.	Terbangunnya Kios Pasar Inpres Melingkar				Kios	0	210	0	0	210	0	0	0	0	267	-	0%	-	-	127%
8.	Terbangunnya Pasar Baning Kota & Sungai Ana				Kios	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
9.	Terbangunnya Pasar Desa di 6 Desa				Kios	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
10.	Terbangunnya Pasar Babi				Kios	0	16	0	0	16	0	10	0	0	0	-	63%	-	-	0%
11.	Terbangunnya Pasar Sayur Sungai Durian				Kios	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
12.	Terbangunnya Pasar Komplek RS Rujukan				Kios	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
13.	Terbangunnya Pasar Buah Terminal S.Durian				Kios	0	72	0	36	0	0	0	0	36	0	-	0%	-	100%	-
15.	Terbangunnya Pasar Junjung Buih				Paket	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	100%	-	-
16.	Terbangunan Pasar				Kios	16	24	0	0	0	16	24	0	0	0	100%	100%	-	-	-

	Kapuas Kanan hilir																			
17.	Terbangunya Pasar Merakai				Kios	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	-	-	100%	-	-
18.	Terbangunnya Pasar Kios Desa Emparu				Kios	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	-	-	-	100%	-
19.	Tersedianya Laporan Pendataan PKL				Buku	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Terbangunnya Pasar Los Sungai Durian				Los	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	-	-	-	-	100%
21.	Tersedianya data dan informasi pembinaan				Buku	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	100%	100%	-	-	-
22.	Terlaksananya Promosi Produk IKM				Event	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	100%	100%	100%	-	-
23.	Tersedianya data Produk AMDK dan AMIU				Sampel	5	20	50	10	0	5	20	50	10	0	100%	100%	100%	100%	-
24.	Tersedianya Data Pengawasan dan Pengujian Mutu Produk Makanan dan Minuman				Sampel	20	50	50	20	0	20	50	50	20	0	100%	100%	100%	100%	-
25.	Tersedianya Buku Profil				Buku	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%

	Perusahaan																			
26.	Tersedianya data Pengawasan Perizinan				Buku	10	16	10	14	14	10	16	10	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
B.	Bidang Koperasi dan UMKM																			
1.	Meningkatnya Kemampuan berwirausaha pada usaha Mikro				Orang	30	30	30	30	30	0	25	25	30	0	0%	83%	83%	100%	0%
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pengelola koperasi				Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Perjanjian kerjasama kemitraan				Orang	40	40	40	40	40	0	0	40	40	0	0%	0%	100%	100%	0%
4.	Terlaksananya Promosi Produk UMKM				Event	2	2	2	2	2	1	1	2	0	2	50%	50%	100%	0%	100%
5.	Tersedianya Informasi Dana bergulir				Koperasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
					LKM	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
					UMKM	80	80	80	80	80	80	80	80	45	0	100%	100%	100%	56%	0%

6.	Meningkatnya Kemampuan Pembina Penggerak Ekonomi Rakyat				Orang	60	60	60	60	60	50	0	0	0	0	83%	0%	0%	0%	0%
7.	Meningkatnya pemahaman thd UU 17/2012				Orang	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	-	-	-	100%	-
8.	Meningkatnya kemampuan UMKM Usaha Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil				Orang	10	10	10	10	10	0	0	5	0	0	0%	0%	50%	0%	0%
9.	Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran KUMK				Unit/Pkt	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	-	100%	-
10.	Meningkatnya kemampuan pengawas koperasi				Orang	40	40	40	40	40	30	30	25	25	30	75%	75%	63%	63%	75%
11.	Tersedianya Buku Kelengkapan Administrasi				Set	55	0	55	15	0	0	0	17	15	0	0%	-	31%	100%	-

12.	Terlaksananya Pembinaan Pengawas dan Penghargaan Koperasi Berprestasi				Koperasi	13	12	13	13	10	13	12	13	13	10	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Meningkatkannya Kualitas Pengelola KSP/USP				KSP/USP	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	-	-	-	100%	-
14.	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Klasifikasi Koperasi				Koperasi	0	50	19	0	11	0	0	19	0	11	-	0%	100%	-	100%
15.	Fasilitasi Kemudahan Pembiayaan UMKM				Orang	50	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0%	0%	100%	100%	0%
16.	Meningkatnya kemampuan Koperasi dan UMK dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan				Orang	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	-	-	100%	-	-
17.	Meningkatnya kemampuan Pengawas Koperasi				orang	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	-	-	100%	-	-
18.	Terlaksananya				Koperasi	0	0	1	1	4	0	0	1	1	4	-	-	100%	100%	100%

	Pembinaan Pengawas Koperasi Penerima Bantuan PLTMH/KPDT																			
C.	Bidang Perindustrian																			
1.	Tercapainya kemampuan pengrajin dalam mengelola Bata Merah				Orang	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
2.	Tecapainya Kemampuan Bimtek Pandai Besi				Orang	0	20	20	20	20	0	20	15	15	0	-	100%	75%	75%	0%
3.	Terlatihnya Pelaku Usaha Industri Kecil Pengolahan Makanan				Orang	0	20	35	20	20	0	20	35	0	0	-	100%	100%	0%	0%
4.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan IRT				Klp	0	0	0	5	6	0	0	0	5	6	-	-	-	100%	100%
5.	Terlaksananya Promosi Produk Kerajinan Rakyat				Event	2	0	1	1	4	2	0	1	1	4	100%	-	100%	100%	100%
6.	Tersedianya Data Informasi Penyuluhan				Buku	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

7.	Tersedianya SDM Pengrajin Meubel Kayu				Orang	4	0	6	0	0	4	0	6	0	0	100%	-	100%	-	-
8.	Terlatihnya pelaku usaha gula aren				Orang	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100%	-	-	-	-
9.	Terlatih pengrajin bordir dan tenun ikat				Orang	30	30	30	30	30	30	20	30	0	0	100%	67%	100%	0%	0%
10.	Terlatihnya pengrajin rotan				Orang	0	20	10	20	0	0	20	10	20	0	-	100%	100%	100%	-
11.	Tercapainya kemampuan Kelompok Pengolahan Teknologi Minyak Asiri				Unit/Pkt	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	-	100%	-
12.	Tersedianya data industri				Buku	50	6	20	0	10	50	6	20	0	10	100%	100%	100%	-	100%
13.	Tersedianya bangunan penunjang workshop pupuk kompos				unit	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	100%	-	0%	0%	-
14.	Tercapainya penyediaan sarana pelaku IKM				Klp	0	10	10	10	0	0	10	10	0	10	-	100%	100%	0%	-
15.	Terlatihnya latihan kerja bagi pelaku IKM				Orang	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	-	-	100%	-	-
16.	Tercapainya				Paket	0	0	6	8	0	0	0	6	8	0	-	-	100%	100%	-

	penambahan sarana prasarana Galeri																			
17.	Terlatihnya Pelaku Usaha IKM dalam pengelolaan tahu				Orang	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	-	-	-	-	100%
18.	Terlaksananya pemberian sertifikat Halal				Orang	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	-	-	-	-	100%
19.	Tercapainya peningkatan kualitas GKM				Konpeksi	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	100%	50%	50%	0%	50%
20.	Terlaksananya Pengawasan dan pengujian				Sampel	0	0	10	10	10	0	0	10	10	10	-	-	100%	100%	100%
21.	Terlatihnya pelaku IKM garam				Orang	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	-	-	-	100%	-

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

(Dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAU	7.458.339,39	3.841.636,5	10.417.044	18.421.333	14.957.855,1	7.243.057,1	3.670.770,9	4.871.363,1	17.893.161	14.714.978,6	97,11	95,55	46,76	97,13	98,38		

																11.019.241,59	9.678.666.221
DAK	897.300	989.540	2.276.800	795.830	2.232.180	897.300	989.540	2.276.800	795.830	2.232.180	100	100	100	100	100	1.438.330	5.405.906.000
TP	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	6.916.527,8	0	0	0	0	86,46	1.600.000	1.383.305.560

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindagkop UKM

2.4.1 Tantangan

1. Melihat pelaku usaha UMKM khususnya untuk usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha ekonomis, dengan badan usaha perseorangan kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi yang tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM semakin rumit karena jumlah dan jangkauan demikian banyak dan luas terlebih di daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
2. Lemahnya kelembagaan pada Koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi Aktif.
3. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, seberapa besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dan legalitas tidak memadai.
4. Koperasi dan UMKM menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kebanyakan SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya selain itu kurangnya lembaga pengembangan usaha, lembaga diklat dan inkubator.
5. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama pada bahan baku, permodalan, teknologi serta informasi pasar. Kondisi ini berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing.
6. Keberadaan aparatur dari sisi jumlah dan keterampilan / keahlian dan sarana dan prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan koperasi dan UMKM.
7. Rendahnya kesadaran para pengusaha mentaati peraturan bidang perizinan usaha perdagangan yang berlaku.
8. Semaraknya peredaran produk dari luar maupun lokal yang tidak memenuhi standar SNI.

9. Semakin maraknya usaha air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
10. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM bagi pelaku IKM.
11. Pelaku IKM kurang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
12. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki pelaku IKM sehingga usaha yang dilakukan hanya memperbanyak usaha sampingan.
13. Masih banyak produk-produk IKM yang belum memiliki hak paten.

2.4.2 Peluang

1. Tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian.
2. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik karena didukung stabilitas politik dan keamanan.
3. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terletak di Wilayah Timur Propinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan luar negeri akan membuka peluang perdagangan barang dan jasa bagi koperasi dan UMKM, produk IKM terutama produk unggulan daerah dan produk kreatif
4. Potensi permodalan yang terbuka luas untuk menjadikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro dari skim kredit pemerintah dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.
5. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan kerajinan, ekspor non migas dan penciptaan lapangan kerja baru.
6. Meningkatnya jumlah usaha dan perdagangan bebas memungkinkan Kabupaten Sintang menjadi jalur ekspor dan impor sehingga pengusaha maupun berdaya saing global.
7. Banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Sintang.
8. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas telah memperluas gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang yang dikirimkan bervariasi baik produk dalam maupun luar negeri.
9. Banyaknya permintaan produk IKM.

Adanya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM untuk meningkatkan produk baik kualitas maupun kuantitas.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Penyelenggaraan pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan umum unit kerja maupun permasalahan spesifik bidang pada Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang. Ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain:

Tabel 3.1.1
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindagkop Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Bidang Industri

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	Penciptaan Iklim Usaha IKM			
1.	Sosialisasi IKM	Belum semua Kabupaten terbentuknya kelompok IKM	Fasilitas dan pelayanan pada kelompok IKM	Dengan adanya sosialisasi membuka pelayanan pada IKM lebih baik
2.	Bimtek bagi Kelompok IKM	Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan IKM	Belum adanya kerjasama kelompok IKM	Adanya kemauan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan
3.	Rintisan pengembangan OVOP (One Village One Product)	Kurangnya sosialisasi OVOP	Belum semuanya desa mempunyai produk unggulan	Adanya kesadaran IKM untuk mengikuti pelatihan
4.	Fasilitasi dan Perkuatan Kemitraan Kelompok IKM	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran	Adanya kesadaran IKM untuk peningkatan SDM
II.	Pengembangan dan	Terbatasnya kemampuan	Terbatasnya	Adanya

1.	Keunggulan Kompetitif IKM Terlaksananya pelatihan kelompok IKM	pemerintah	anggaran pembangunan	kesadaran IKM untuk mengikuti pelatihan
2.	Peningkatan Kualitas SDM	Masihnya rendahnya kualitas pelatihan	Kapasitas SDM	Adanya kesadaran IKM untuk peningkatan SDM
3.	Terlaksananya pelatihan HAKI bagi kewirausahaan	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Adanya kesadaran IKM untuk mengikuti pelatihan
III.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi IKM			
1.	Fasilitasi Promosi Produk IKM	Fasilitas Pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	IKM lebih aktif membuka peluang
2.	Fasilitas Pasar Rakyat	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Adanya produk unggulan daerah
3.	Pengembangan Usaha bagi IKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
4.	Sosialisasi pembinaan IKM	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
5.	Bimtek Pengembangan Usaha IKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
6.	Penyelenggaraan Promosi Produk IKM	Kemampuan menyelenggarakan promosi terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Peran serta swasta dan pemerintah
7.	Fasilitasi Pemasaran melalui Galeri dan Pasar Tradisional	Galeri dan pasar tradisional terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Peran serta swasta dan pemerintah
8.	Pembangunan IKM, Sentra IKM dan Utilitasnya	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM

IV.	Peningkatan Kualitas Pengembangan IMK			
1.	Pemberdayaan IKM melalui Dekranasda	Kurangnya peran serta Dekranasda	Koordinasi lemah	Fungsi dan peran Dekranasda
2.	Pembinaan dan Pengembangan IKM berprestasi	Kurangnya pembinaan yang penghargaan diberikan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Motivasi bagi IKM

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.1.2
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Perdagangan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1.	Peningkatan pengawasan barang dan jasa	Barang dan jasa yang beredar tidak sesuai dengan aturan/ketentuan perdagangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	1. Pembentukan tim pengawasan terpadu melibatkan dinas instansi terkait
2.	Pengawasan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Lemahnya penggunaan alat UTTP yang tidak akurat	Belum tersedianya SDM dibidang kemetrologian	2. Sosialisasi tentang peraturan peundang-undangan Pengadaan SDM dibidang kemetrologian
3.	Monitoring/ Pemantauan Produk AMDK/ AMIU dan Pemasarannya.	Banyaknya pelaku usaha DAMIU yang tidak melaksanakan aturan/ketentuan yang	Kurangnya koordinasi dinas instansi terkait	1. Pembentukan tim pengawasan DAMIU

		berlaku		<ol style="list-style-type: none"> 2. Terciptanya persaingan usaha yang sehat 3. Terjaminnya mutu produk DAMIU
4.	Pemantauan Produk Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib	Banyaknya barang beredar yang tidak bertanda SNI	<p>Kapasitas SDM yang terbatas (PPBJ-PK)</p> <p>Tidak tersedianya anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan SDM PPBJ-PK melalui Diklat 2. Produk yang beredar berstandar SNI
5.	Monitoring dan Pemantauan produk Kadarluasa dan kelengkapan Label	<p>Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang aturan pelabelan</p> <p>Banyaknya barang beredar yang tidak sesuai dengan aturan pelabelan</p>	<p>Tidak tersedianya anggaran</p> <p>Kurangnya koordinasi dinas instansi terkait</p> <p>Belum tersedianya SDM (PPBJ-PK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan 2. Sosialisasi tentang peraturan pelabelan 3. Pengadaan SDM PPBJ-PK melalui Diklat
6.	Pengawasan Distribusi penyaluran pupuk dan BBM Bersubsidi	Kurangnya Informasi / Laporan Distributor Terkait Stock BBM dan Pupuk Bersubsidi yang disampaikan Dinas Instansi terkait	Lemahnya Pengawasan terhadap Distribusi Pupuk dan BBM yang ada di beberapa Kec. Dan terbatasnya Anggaran.	Perlunya dilakukan Monitoring dan Pemantauan Distribusi Pupuk dan BBM Bersubsidi di Beberapa Kecamatan yang rawan terhadap akses distribusi
7.	Pembentukan BPSK	Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Belum terlaksananya seleksi pemilihan anggota BPSK	Belum terbentuknya BPSK	Membentuk BPSK
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana BPSK	Belum tersedianya sarana dan prasarana BPSK	Terbatasnya anggaran	Tersedianya tempat (Ruang) Pelayanan BPSK

9.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Banyaknya permasalahan (Kasus-kasus) antara pelaku usaha dan konsumen	Belum terbentuknya lembaga perlindungan konsumen	1. Pengadaan SDM PPBJ-PK melalui Diklat 2. Membentuk lembaga perlindungan konsumen Perlu dilakukan sosialisasi UU No.8 Tahun 1999
10.	Sosialisasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Kurangya pengetahuan pelaku usaha/konsumen tentang peraturan perundang-undangan	Terbatasnya anggaran	Pembentukan kelompok Konsumen Cerdas
11.	Forum Konsumen Cerdas	Belum terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pada konsumen	Terbatasnya pemahaman konsumen tentang perlindungan konsumen	Tingginya Tingkat Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Di Pasaran
12.	Operasi Pasar	Tidak Stabilitasnya Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pasaran	Terbatasnya Anggaran dan Tidak terjangkaunya Lokasi	Tingginya Tingkat Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Di Pasaran
13.	Pasar Murah (Fasilitasi Pasar Murah)	Tidak Stabilitasnya Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pasaran	Terbatasnya Anggaran dan Tidak terjangkaunya Lokasi	Tingginya Tingkat Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Di Pasaran
14.	Monitoring harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Terjadinya Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran	Lemahnya Pengawasan Terhadap Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Perlu dilakukan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis Lainnya
II. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
1.	Pembangunan Gedung UPT Metrologi Legal	Belum tersedianya gedung UPT	Terbatasnya anggaran	Pembangunan gedung UPT Metrologi Legal
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal	Belum tersedianya sarana dan prasarana di UPTD METROLOGI LEGAL	Terbatasnya anggaran	Pembangunan gedung UPT Metrologi Legal

3.	Sosialisasi UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha/konsumen tentang METROLOGI LEGAL	Terbatasnya anggaran	Perlunya dilakukan sosialisasi
4.	Pendataan Alat UTTP dan Kelengkapannya	Belum terlaksananya pendataan secara keseluruhan, sehingga data alat UTTP yang ada belum akurat	Terbatasnya anggaran	Melaksanakan pendataan ke pengguna alat UTTP (Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Perusahaan)
5.	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Alat UTTP yang digunakan pelaku usaha belum bertanda tera sah	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengguna alat UTTP Tidak tersedianya anggaran pembentukan pasar tertib ukur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaminnya kebenaran pengukuran dan tertib niaga 2. Pembentukan pasar tertib ukur 3. Perlu mengangarkan dana pembentukan pasar tertib ukur
6.	Tera-tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang	Banyaknya alat UTTP yang belum bertanda tera sah	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap penggunaan alat UTTP Belum tersedianya SDM Penera Belum berfungsinya UPT Metrologi Legal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelaksanaan tera-tera ulang 2. Pengadaan SDM/Diklat Penera 3. Memfungsikan UPT Metrologi di Kabupaten Sintang
7.	Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri	Rendahnya Promosi Produk Unggulan IKM	Terbatasnya Anggaran	Adanya Usaha untuk melakukan Event Promosi baik di Tingkat Nasional maupun Internasional

8.	Penyusunan Prognosa dan Pemantauan Stock Sembako	Tidak Tersedianya Data Stock Sembako dan Data Pola Konsumsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pokok	Terbatasnya informasi dari Pelaku Usaha	Terjalannya Kerjasama antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah
9.	Pendataan Kemitraan	Belum terlaksananya Kegiatan Pendataan Kemitraan	Terbatasnya Anggaran	Banyaknya Lembaga Keuangan dan Toko Modern yang membuka Peluang untuk Melakukan Kemitraan
10.	Kemitraan (Match Making) dunia usaha antara pelaku usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar	Belum terlaksananya Kegiatan Pendataan Kemitraan	Terbatasnya Anggaran	Terciptanya Kerjasama Antara Pelaku Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar
11.	Pengembangan database informasi potensi unggulan	Belum Tersedianya Data Potensi Unggulan	Terbatasnya Anggaran	Adanya Peningkatan Potensi Unggulan Daerah
12.	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi (gudang non SRG)	Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Gudang untuk mengantisipasi sarana distribusi kebutuhan bahan pokok	Terbatasnya Anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana gudang.	Perlu dilakukan Diklat Teknis
13.	Monitoring dan Pengawasan perizinan	Lemahnya perizinan yang tidak didukung secara online maupun manual.	Lemahnya Sarana dan Prasarana Pendukung serta Kapasitas SDM yang terbatas	Adanya upaya pelayanan tepat waktu dan transparan dan akuntabel
14.	Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol	Lemahnya Pelayanan Perizinan terkait Perda yang mendukung Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol	Belum dilakukannya Kajian terhadap Distribusi dan Peredaran yang diatur dalam Perda.	Perlu dibuat suatu studi banding terhadap pembuatan dan Rancangan Perda Khusus Minuman Beralkohol.

15.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Meningkatkan Pengetahuan Pelaku Usaha Dalam Menggunakan Sarana Teknologi Informasi untuk mempromosikan Produknya.	Terbatasnya Anggaran	Banyaknya Jumlah UMKM dan IKM
III.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional			
1.	Sosialisasi Forum Pertemuan Perdagangan Luar Negeri	Belum diberlakukannya Perdagangan Lintas Batas terkait Perdagangan Luar Negeri.	Rendahnya Pengetahuan tentang Perdagangan Luar Negeri bagi Kalangan Dunia Usaha	Perlu dilakukannya Sosialisasi terkait Ketentuan dan Peraturan Perdagangan Luar Negeri berkenaan Ekspor Import
IV.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Belum berfungsinya Pasar milik Pemerintah	Terbatasnya Anggaran Pembangunan	Adanya Pasar milik Pemerintah di Kecamatan
2.	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan	Belum berfungsinya Pasar milik Pemerintah	Terbatasnya Anggaran Pembangunan	Adanya Pasar milik Pemerintah di Kecamatan
3.	Pemasangan Jaringan Listrik Pasar Pemerintah	Infrastruktur jaringan listrik tidak memadai	Kapasitas daya tidak mencukupi	Rencana menganggarkan pemasangan jaringan dan gardu
4.	Penyusunan Kajian Akademik Draft Raperda tentang Pasar	Belum tersusunnya raperda tentang pasar	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
5.	Kaji Terap Perda tentang Pengelolaan Pasar	Kemampuan SDM yang masih rendah	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan

6.	Penyusunan Kajian Pembangunan, Penataan, dan Pengelolaan Pasar	Kemampuan SDM yang masih rendah	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
7.	Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah	Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas pasar pemerintah	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
8.	Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	Kurangnya staf teknis perencana pembangunan pasar	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
9.	Penetapan Kawasan Sentra PKL	Belum ada Perda tentang PKL	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
10.	Penyusunan Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar	Belum ada Perbup tentang UPTD Pasar	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
11.	Pendataan dan Pelayanan Restribusi, Pasar, Grosir dan Pertokoan	Kurangnya staf teknis	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
12.	Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Retribusi, Pasar, Grosir dan Pertokoan	Belum adanya sistem informasi	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
V.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
1.	Pendataan, Penataan dan Fasilitasi bagi PKL dan Asongan	Kurangnya petugas penataan	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
2.	Penyuluhan PKL dan Asongan	Kurangnya tenaga penyuluh	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.1.3
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam berwirausaha	Terbatasnya kemampuan aparatur dan fasilitas pemerintah yang kurang menunjang	Terbatasnya kemampuan aparatur dan fasilitas pemerintah yang kurang menunjang	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwirausaha
2	Meningkatkan kemampuan UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
3	Meningkatkan kemampuan UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
4	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam fasilitasi lembaga pembiayaan	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	peran serta perbankan dan aktifnya KUKM membuka peluang
5	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam fasilitasi lembaga pembiayaan	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	peran serta perbankan dan aktifnya KUKM membuka peluang
6	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
7	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
8	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
9	Terlaksananya promosi produk UMKM	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran	produk upaya UMKM masih diminati
10	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
11	Terlaksananya sosialisasi tentang HKI bagi UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	adanya kesadaran Koperasi melaksanakan pendidikan mandiri melalui dana pendidikan

12	Meningkatkan kemampuan pelaku UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
13	Meningkatkan kemampuan manajerial bagi pengelola koperasi dan KUD	Lemahnya penataan administrasi dan manajemen koperasi	Kapasitas SDM sumber pembiayaan	Kemandirian koperasi dan UMKM
14	Meningkatkan kemampuan modal usaha bagi UMKM	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	KUKM lebih aktif membuka peluang
15	Berkembangnya klaster bisnis bagi UMKM	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
16	Terlaksananya pemasaran produk UMKM	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran	produk upaya UMKM masih diminati
17	Terlaksananya promosi produk UMKM	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran	produk upaya UMKM masih diminati
18	Tersedianya informasi dan data peminjam	Lemahnya monitoring dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya anggaran	Kesadaran peminjam akan kewajibannya
19	Meningkatkan SDM usaha penggerak ekonomi kerakyatan	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	KUKM lebih aktif membuka peluang
20	Meningkatkan kemampuan SDM bagi UMKM	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	KUKM lebih aktif membuka peluang
21	Meningkatkan sarana dan prasarana koperasi	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran penunjang	Meningkatnya kesadaran Koperasi dalam meningkatkan kualitas koperasi
22	Tersedianya informasi dan data UMKM	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Kesadaran UMKM dalam mencari peluang kemitraan dan permodalan
23	Meningkatkan pelayanan bagi KUMKM	kurangnya fasilitas	kurangnya fasilitas	Aparatur yang terlatih
24	Tersedianya data kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM

25	Adanya personel auditing bagi pengawasan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
26	Adanya informasi bagi Pengelola Koperasi tentang pengembangan perkoperasian	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM
27	Terlaksananya sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM
28	Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
29	Meningkatkan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kemitraan koperasi masih terbatas	Usaha yang dimitrakan terbatas	Kemitraan meningkatkan perkembangan usaha
30	Mengembangkan model pola perkoperasian	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM
31	Menerapkan teknologi/manajemen modern dalam usaha koperasi	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Kesadaran koperasi dalam penerapan teknologi/manajemen modern
32	Meningkatkan usaha koperasi	kurangnya fasilitas	kurangnya fasilitas	Kemandirian koperasi
33	Tersedianya pengelola Koperasi yang terlatih	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi pengelolaan koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
34	Adanya data valid tentang perkembangan Koperasi/KUD	Lemahnya monitoring dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya anggaran	Kesadaran Koperasi/KUD melaporkan perkembangannya

35	Adanya personel auditing bagi pengawasan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi auditing bagi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
36	Adanya personel akuntan bagi pengawasan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi akuntan bagi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
37	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi berprestasi	Kurangnya pembinaan pengawasan dan penghargaan yang diberikan	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Motivasi bagi UMKM
38	Menguatkan sistim pendukung usaha bagi UMKM	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian Koperasi dan UMKM
39	Terselenggaranya pelayanan thp pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Aparatur yang tersedia
40	Tersedianya personel analisa laporan keuangan	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi analisis bagi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Aparatur yang tersedia
41	Terselenggaranya pelatihan penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan)	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian Koperasi dan UMKM
42	Melaksanakan pengawasan koperasi penerima fasilitas bantuan APBD	Terbatasnya anggaran dalam pengawasan	Terbatasnya anggaran pengawasan	Kemandirian Koperasi dan UMKM

43	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bansos Kemenkop dan UKM	Terbatasnya anggaran monev	Terbatasnya anggaran monev	Kemandirian Koperasi dan UMKM
44	Menyelenggarakan kegiatan hari Koperasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian Koperasi dan UMKM dalam mengikuti kegiatan tersebut
45	Adanya peran organisasi gerakan koperasi dalam dunia usaha	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Adanya peran pelaku usaha dalam membentuk koperasi
46	Menyediakan data koperasi yang valid	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kesadaran Koperasi dalam melaporkan perkembangan koperasi
47	Meningkatkan kualitas koperasi/KUD sehingga lebih aktif	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Koperasi lebih aktif membuka peluang usaha
48	Terselenggaranya IUMK bagi UMK	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Meningkatnya kesadaran UMK akan kelembagaan usahanya

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera tentu melalui tahapan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana yang diinginkan setiap Kepala Daerah yang dituangkan dalam Visi, Misi pembangunan. Adapun Visi Kabupaten Sintang periode 2016-2021 sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021".

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, maka salah satu kebijakan yang akan dijalankan adalah program kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mencerminkan strategi konkret untuk diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Industri terdiri dari ;
 1. Pengembangan industri pengolahan :

- a) Peningkatan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri)
 - b) Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan.
 - c) Pengembangan industri pengolahan untuk menciptakan usaha produktif dan kesempatan kerja.
 - d) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
 - e) Peningkatan Kompetensi inti daerah sebagai pengembangan produk unggulan daerah.
 - f) Peningkatan sarana dan prasarana industri pengolahan.
 - g) Penguatan kemitraan industri sedang/besar dengan industri kecil.
 - h) Peningkatan daya saing dan promosi produk industri unggulan daerah.
2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) ;
- a) Perencanaan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).
 - b) Pembinaan usaha IKM.
 - c) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi IKM.
 - d) Pengembangan sentra sentra IKM potensial.
 - e) Peningkatan peralatan, inovasi produksi dan desain kemasan IKM.
 - f) Peningkatan kapasitas produksi dan promosi produk IKM.
 - g) Peningkatan kegiatan pelatihan bagi IKM.
 - h) Fasilitas pembiayaan usaha IKM pada perbankan.
 - i) Fasilitas kerjasama kemitraan dengan perusahaan menengah / besar.
3. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi ;
- a) Pembinaan kemampuan teknologi industri.
 - b) Pengembangan teknologi tepat guna (TTG).
 - c) Pelatihan keterampilan usaha pada industri kerajinan dan industri rumah tangga.
 - d) Pembinaan dan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.
 - e) Bantuan peralatan.
- b. Peningkatan Perdagangan terdiri dari :
1. Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
 - a) Sosialisasi dan desiminasi UU / Peraturan tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

- c) Monitoring, distribusi, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.
 - d) Peningkatan pengawasan barang dan jasa.
 - e) Pengembangan pemasaran hasil produksi daerah.
 - f) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
 - g) Kerjasama pemasaran komoditi potensi daerah.
 - h) Sertifikasi mutu barang / mutu komoditi dan peningkatan pelayanan sertifikasi.
 - i) Peningkatan pelayanan kemetrolagian.
 - j) Pengawasan dan penerapan aplikasi SIUP dan TDP.
 - k) Fasilitasi operasi pasar / pasar murah bahan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Peningkatan Daya Saing Perdagangan Daerah.
- a) Sosialisasikan dan pembinaan SNI.
 - b) Bimbingan teknis perdagangan.
 - c) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
 - d) Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah dan promosi dagang dalam negeri / luar negeri.
 - e) Pengembangan informasi peluang pasar produk unggulan daerah.
 - f) Partisipasi dalam rangka pameran dagang keluar daerah / luar negeri.
- c. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan UMKM-Koperasi terdiri dari:
1. Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 - a) Pemberdayaan potensi ekonomi pedesaan.
 - b) Pengembangan system pendukung usaha ekonomi kerakyatan.
 - c) Penyaluran kredit usaha rakyat secara bergulir pada UMKM dan Koperasi.
 - d) Fasilitasi pembiayaan UMKM dan Koperasi pada perbankan dan lembaga pembiayaan
 - e) Sosialisasi program bantuan pemerintah untuk UMKM dan Koperasi.
 2. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UMKM :
 - a) Penyusunan kebijakan tentang UMKM.
 - b) Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.
 - c) Sosialisasi kebijakan tentang UMKM.
 - d) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang UMKM

- e) Peningkatan dukungan usaha (permodalan dan peralatan) bagi UMKM potensial.
3. Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM dan Koperasi :
- a) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
 - b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
 - c) Peningkatan system informasi perencanaan pengembangan UMKM dan Operasi
 - d) Peningkatan jaringan usaha UMKM dan Koperasi.
 - e) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan Koperasi.
 - f) Fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM.
 - g) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi UMKM.
 - h) Fasilitasi kegiatan promosi usaha bagi UMKM.
4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM :
- a) Peningkatan koordinasi antara lembaga.
 - b) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.
 - c) Penyelenggaraan promosi produk UMKM.

Faktor-faktor yang menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendukung Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	- Lahan/Lokasi yang tersedia	- SDM	- Kebijakan pusat
2.	Pembangunan	- Regulasi	- Anggaran SKPD	- Pelimpahan

	UPT Metrologi Legal	<ul style="list-style-type: none"> - Dana yang tersedia - SDM yang belum tersedia 		<ul style="list-style-type: none"> urusan metrologi - Misi KDH dan Wakil Terpilih
3.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku pelaku usaha - Kesadaran konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - Mental pelaku usaha dan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
4.	Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Akses distribusi barang dan jasa - Kualitas produk 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM - Ketaatan pada peraturan anggaran - Daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
5.	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Komoditas ekspor - Pelabuhan ekspor - Minat investor 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk ekspor - Anggaran - SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
6.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM IKM - Informasi teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
7.	Penataan Struktur Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana industri - Kawasan industri - Regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
8.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
9.	Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
10.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi - Lokasi Sentra - Sarana Prasarana IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - SDM IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
11.	Pencapaian iklim usaha yang kondusif pada UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Akses permodalan - Sosialisasi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
12.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pada UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan rendah - Manajemen rendah - Kualitas UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran dan Kualitas UMKM - Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Misi KDH dan Wakil
13.	Pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - SDM KUKM - Pemasaran lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran - Kualitas produk 	<ul style="list-style-type: none"> - Animo masyarakat tinggi - Kebijakan pusat dan Misi KDH dan

				Wakil
14.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Kualitas koperasi - Pengawasan lemah - Sosialisasi kurang	- SDM Koperasi - Anggaran - Pembinaan terbatas	- Animo masyarakat tinggi - Kebijakan pusat dan Misi KDH dan Wakil
Misi 6. Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih				
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	- Sumber Daya Aparatur	- Sikap dan mental aparatur, sarana dan prasarana kantor masih kurang	- Pembinaan reward dan Misi KDH dan Wakil
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Sarana dan Prasarana Perkantoran		
3.	Peningkatan disiplin aparatur	- Anggaran		
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Sumber Daya Aparatur		
5.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Sumber Daya Aparatur		

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3.1.1

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Industri

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	Perspektif Pemangku Kepentingan			
1.	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional (PDB)	Masih sedikitnya jumlah unit usaha industri sedang dan besar di Kab. Sintang	Pertumbuhan industri sedang dan besar yang masih rendah	Dukungan politik Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Belum adanya kesadaran pelaku	Belum adanya master plan kawasan industri	Adanya perencanaan kawasan industri dan

3.	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	usaha Belum adanya kesadaran pelaku IKM	Pelaku IKM belum ada inovasi terhadap produk	Repida Adanya diklat tentang inovasi produk
4.	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Kurangnya instruktur dan penyuluh ahli tentang inovasi dan teknologi	Kurangnya kemampuan permodalan untuk mendukung inovasi dan penguasaan teknologi	Adanya bantuan peralatan industri dan adanya anggaran untuk bimtek penyuluh/mendatangkan instruktur ahli
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Sektor industri di Kab. Sintang masih sebatas Industri Kecil Menengah	Terbatasnya jumlah industri sedang dan besar yang dapat menyerap tenaga kerja	Mengkaji kelayakan didirikannya Kawasan Industri di Sungai Ringin Sintang
II.	Perspektif Internal	Proses		
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional	Infrastruktur Kab. Sintang belum mendukung berdirinya Industri Sedang dan Besar	Terbatasnya infrastruktur jalan dan listrik	Adanya perencanaan kawasan industri dan Repida

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	Belum adanya aplikasi informasi data industri yang valid	Terbatasnya anggaran untuk pendataan	Adanya kemauan untuk membuat aplikasi informasi data industri

Sumber: Kementerian Perindustrian dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.1.2
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Perdagangan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

	Perdagangan	UKM Kabupaten Sintang		
1	2	3	4	5
I.	Program Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai tambah dan jasa	Belum dilakukannya Sosialisasi tentang ketentuan Peraturan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah SDM yang minim	Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen
2.	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional	Belum Maksimalnya dilakukan Pemantauan dan Monitoring serta Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kapasitas SDM yg terbatas	Perlu dilakukannya sosialisasi
3.	Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor	Belum maksimalnya dilakukan bimbingan teknis terkait produk yang dihasilkan	Belum dilakukan secara maksimal pameran dagang	Mengikuti berbagai event promosi baik ditingkat nasional maupun internasional
4.	Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif)	Belum mendukung sepenuhnya Deregulasi kebijakan tata niaga perdagangan	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukannya sosialisasi tentang sarana dan prasarana distribusi dikalangan dunia usaha
5.	Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding)		Terbatasnya Alokasi Anggaran	Perlu dilakukannya pameran promosi di berbagai event
6.	Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor	Perlu dilakukannya Bimbingan Teknis terkait Diversifikasi produk unggulan daerah Belum terbentuknya Asosiasi importir yang ada di daerah	Rendahnya SDM bagi pelaku usaha	Perlu dilakukan pembentukan asosiasi di bidang ekspor impor

7.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor	Belum terdatanya pelaku usaha dan asosiasi importir	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukannya pendataan dan verifikasi pelaku usaha
8.	Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Luar Negeri di Perbatasan	Belum tersedianya ketentuan dan Peraturan Daerah tentang Perdagangan Lintas Batas	Belum terbentuknya asosiasi pedagang perbatasan	Perlu dilakukannya pendataan pedagang/pelaku usaha yang berada di perbatasan
9.	Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri	Perlu dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan peraturan terkait tata niaga perdagangan	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukannya pendataan dan informasi tentang regulasi perdagangan luar negeri
II.	Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan	Kurangnya SDM dalam meningkatkan perdagangan di luar negeri	Terbatasnya SDM	Perlu diikutsertakan berbagai diklat dibidang perdagangan
2.	Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional	Belum tersedianya sarana dan prasarana gudang untuk menunjang ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok.	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukan diklat teknis tentang kebijakan perdagangan
3.	Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi	Belum maksimalnya ketersediaan produk-produk yang di produksi sehingga permintaan belum terpenuhi	Lemahnya daya beli masyarakat berkenaan produk luar	Perlu ditingkatkannya kualitas produk dalam negeri
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	Belum dilakukannya sosialisasi tentang ketentuan	Belum adanya peraturan pemanfaatan pasar berjangka komoditi,	Direncanakan pembangunan pasar berjangka komoditi, SRG dan Pasar lelang

		peraturan yang mengatur perdagangan berjangka komoditi	SRG dan Pasar Lelang	
5.	Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah	Belum maksimalnya dilakukan sinkronisasi berkenaan ketersediaan berbagai komoditi dan kebutuhan pokok di daerah	Belum tersedianya alokasi dana yang memadai	Sudah dilaksanakan kegiatan operasi pasar dan pasar murah
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Belum maksimalnya pemantauan dan monitoring serta pengawasan arus distribusi barang	Terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok	Sudah dilaksanakan kegiatan operasi pasar dan pasar murah
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standarisasi Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa	Belum pernah dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan peraturan UTTP dan perlindungan konsumen	Belum adanya SDM PPBJ-PK dan SDM Kemetrolgian	Perlu diikutsertakan berbagai diklat teknis dibidang kemetrolgian dan pengawasan barang dan jasa serta
8.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Belum maksimalnya perlindungan konsumen	Terbatasnya Anggaran	Sudah dilaksanakan pengawasan penggunaan alat UTTP peredaran barang dan jasa
III.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
1.	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Belum tersedianya sarana distribusi perdagangan yang representatif	Terbatasnya Anggaran Pembangunan dan Revitalisasi	Tersedianya DAK dan DAU
2.	Penyediaan Fasilitas Pendukung Sarana Distribusi Perdagangan	Belum tersedianya fasilitas pendukung sarana distribusi perdagangan	Terbatasnya Anggaran	Tersedianya DAU
3.	Pelaksanaan Kaji Terap Perda tentang	Belum adanya Perda tentang	Terbatasnya Anggaran	Tersedianya payung hukum (Perda) tentang

4.	Pengelolaan Pasar Penyediaan Kajian Akademik Draft Raperda Pengelolaan Pasar	Pengelolaan Pasar Belum tersedianya Kajian Akademik Draft Raperda pengelolaan pasar	Jumlah SDM yang minim	Pasar Adanya kajian mendalam terhadap Raperda
5.	Penyediaan Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar	Belum tersedianya Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah SDM yang minim	Adanya kajian perencanaan pembangunan yang baik
6.	Peningkatan Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah	Rendahnya pemahaman pengguna fasilitas pasar akan pengelolaan yang baik	Terbatasnya Anggaran dan SDM	Adanya kesadaran penggunaan fasilitas pasar
7.	Pelaksanaan Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi	Belum dilakukannya survey rencana pembangunan dan revitalisasi	Terbatasnya Anggaran	Adanya Perencanaan yang matang terhadap pembangunan/ revitalisasi
8.	Penetapan Kawasan Sentra PKL	Belum adanya kawasan sentra PKL	Terbatasnya Anggaran	Iklim usaha yang kondusif
9.	Penyusunan Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolaannya	Belum adanya Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolaannya	Jumlah SDM yang minim	Adanya payung hukum pengelolaan pasar
10.	Peningkatan Kualitas Data PKL dan Asongan, Penataan dan Fasilitas	Belum tersedianya data PKL dan Asongan, Penataan dan Fasilitas yang baik	Terbatasnya Anggaran dan SDM	Pengelolaan PKL dan Asongan berbasis data
11.	Pelaksanaan Penyuluhan PKL dan Asongan	Rendahnya pemahaman PKL dan Asongan terhadap Perda tentang Pasar	Jumlah SDM yang minim	Adanya kesadaran pemahaman PKL dan Asongan terhadap Perda

Sumber: Kementerian Perdagangan RI dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.1.3
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM beserta faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Koperasi dan UMKM

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam perekonomian			
1.	Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata – rata/tahun)	Lemahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	Rendahnya kelembagaan dan usaha KUMKM	Adanya animo masyarakat dalam menjadikan Koperasi sebagai lembaga usaha
2.	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)	Penyerapan tenaga kerja koperasi dan UMKM terbatas karena usaha yang dikelola bukan padat karya.	Penyerapan tenaga kerja KUMKM masih rendah karena usahanya masih terbatas	Masih adanya penyerapan tenaga kerja koperasi
3.	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)	Belum adanya KUMKM yang mengelola produk – produk ekspor non migas	Produksi KUMKM masih terbatas pada non migas	Adanya kompetensi inti dalam produk unggulan KUMKM
4.	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)	Kecilnya KUMKM yang mengalokasikan dana untuk investasi	Masih rendahnya investasi yang dikelola	Adanya peluang untuk mengelola investasi
II.	Meningkatnya daya			

	saing UMKM			
1.	Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata – rata/tahun)	Masih rendahnya pertumbuhan produktivitas UMKM	Rendahnya kemampuan finansial KUMKM	Adanya program peningkatan sarana produksi
2.	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)	Masih kurangnya akses pembiayaan pada lembaga keuangan (bank dan non bank)	Lemahnya kuantitas permodalan koperasi dan UMKM	Adanya program pembiayaan dari Pemerintah
3.	Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)	Masih rendahnya KUMKM yang menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk	Standarisasi dan sertifikasi produk belum dilaksanakan	Adanya kemauan UMKM untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk
III.	Meningkatnya usaha baru			
1.	Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)	Rendahnya jiwa kewirausahaan KUMKM	Pengelolaan usaha KUMKM masih sederhana	Adanya kemauan KUMKM untuk melakukan usaha
IV.	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi			
1.	Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)	Masih rendahnya partisipasi anggota	Masih rendahnya pendapatan anggota koperasi	Adanya pemahaman kewajiban anggota Koperasi
2.	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata – rata/tahun)	Masih kurangnya kualitas anggota	Kurangnya pemahaman anggota Koperasi	Adanya minat masyarakat untuk membentuk koperasi
3.	Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata – rata/tahun)	Masih kecilnya diversifikasi usaha	Masih kecilnya usaha yang dikelola	Banyaknya peluang usaha yang bisa dikelola

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.3.2.1
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan
Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Bidang Industri

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	Pengembangan Sektor Industri			
1.	Meningkatkan pelatihan tenaga instruktur bagi penyuluh Perindustrian	Terbatasnya instruktur dan tenaga penyuluh	Masih menggunakan tenaga instruktur dari luar	Diklat instruktur bagi penyuluh Perindustrian
2.	Meningkatkan Pembinaan langsung ke lapangan	Terbatasnya prasarana untuk mencapai daerah yang terpencil dengan medan yg berat	Untuk daerah tertentu hanya bisa dikunjungi saat musim kemarau	Penyediaan kendaraan yang memadai
3.	Memfasilitasi bantuan peralatan	Lemahnya kemampuan IKM membuat proposal	Keterbatasan dana APBD untuk pengadaan peralatan bagi IKM yg membutuhkan	Kurangnya bantuan peralatan dari APBD
II.	Pengembangan Sistem Pendukung Sektor Industri			
1.	Penyelenggaraan promosi IKM pada event-event promosi	Hasil kerajinan yang dipamerkan lebih diminati masyarakat	Masih sedikitnya jumlah pameran di luar Kalimantan	Berpartisipasi pada pameran tingkat nasional maupun

		dari luar pulau Kalimantan dan luar negeri		Internasional
2.	Latihan pengembangan SDM bagi pelaku IKM	Belum adanya tenaga instruktur Disperindag	Kegiatan pelatihan masih dilakukan di luar Sintang	Perlunya diklat bagi penyuluh
3.	Penyelenggaraan pembinaan IKM	Terbatasnya pengetahuan pelaku IKM mengenai pentingnya inovasi bagi produk IKM	Pelaku IKM belum adanya inovasi terhadap produk	Adanya diklat tentang inovasi produk
4.	Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk-produk IKM	Galeri yang hanya kurang memadai	Terbatasnya jumlah produk IKM yg ditampung di galeri	Ditambahkan modal awal untuk membeli produk dari pelaku IKM
III.	Pengembangan Kualitas Produk Industri			
1.	Sosialisasi PIRT, sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Kemampuan pemerintah melaksanakan sosialisasi secara berkesenambungan masih kurang	Rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sosialisasi	Diadakan sidak IKM makanan yg belum memiliki izin
2.	Hilirisasi produk dengan bahan baku komoditi unggulan Kab. Sintang	Terbatasnya kemampuan petugas mengenai hilirisasi produk	Program hilirisasi yang masih baru di Kab. Sintang	Diadakan diklat bagi petugas yang menangani hilirisasi produk
3.	Diversifikasi produk lama ke produk baru	Pelaku IKM enggan memproduksi produk baru	Kurangnya pelatihan dan diklat mengenai diversifikasi produk	Membari diklat diversifikasi produk bagi pelaku IKM unggulan
IV.	Program Penataan Struktur Industri			
1.	Kompetisi GKM IKM	Kesulitan dalam menjaring IKM yang layak mengikuti lomba GKM	Peserta GKM kurang bersemangat mengikuti lomba	Menyediakan reward bagi Gugus yang menang

2.	Pengawasan dan pengujian mutu bahan baku industri dan perdagangan di kab. Sintang	Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pengujian bahan baku industri khususnya DAMIU dan AMDK	Masih terdapatnya DAMIU yang belum berizin	Dilakukan sidak pada pelaku IKM
----	---	--	--	---------------------------------

Sumber: Disperindag Provinsi Kalimantan Barat dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.2.2

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Perdagangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang di Dukung dengan Pengamanan Perdagangan Daerah			
1.	Laju Inflasi Kab.Sintang pada Tahun 2014 menyentuh 6,85 %, lebih rendah dibandingkan inflasi di Kalbar (C.Q. Kota Pontianak) yang mencapai 9,48% dan juga dengan inflasi nasional yang mencapai 8,36%	Menurunnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok	Rendahnya pendapatan masyarakat akibat menurunnya harga hasil komoditi	Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah
2.	Sistem Resi gudang sebagai bagian dari pengembangan sistem logistik baru.	Belum tersedianya sarana dan prasarana gudang	Rendahnya SDM tentang pengelolaan Resi Gudang terkait Distribusi.	Perlunya dilakukan Bimbingan Teknis serta Studi Banding tentang Distribusi
3.	Perlu perhatian serius untuk pembentukan dan operasional BPSK di Kab.Sintang	Tidak Tersedianya Dana Pembentukan Anggota BPSK.	Belum Terlaksanannya Pemilihan Anggota BPSK.	Tim Seleksi Pemilihan Anggota BPSK sudah terbentuk
4.	UU Nomor 23 tahun 2014	Tidak	Belum tersediannya	Kelembagaan

mengamanatkan Pemerintah Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan Metrologi legal	tersediannya Anggaran untuk pembangunan Sarana dan Prasarana serta SDM Metrologi Legal	Sarana dan Prasarana, serta SDM Metrologi legal	Metrologi di Kab.Sintang sudah terbentuk pada Th.2015
---	--	---	---

Sumber: Disperindag Provinsi Kalimantan Barat dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.2.3

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Bidang Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing.	Belum mampu meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan Iptek	Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengadakan pelatihan serta fasilitas yang tersedia kurang memadai	Kemandirian lembaga usaha dalam meningkatkan pelayanan yang berbasis Iptek
2	Meningkatnya omzet KUMKM	Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam mengoptimalkan peran perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk mendukung modal usaha KUMKM	Aktifnya KUMKM mencari peluang dalam menguatkan kemampuan usahanya serta semakin meningkatnya manajemen lembaga

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif dalam mematuhi ketentuan hukum perdagangan.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk memanfaatkan tera ulang alat ukur
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan peredaran makanan, minuman dan produk yang berbahaya

- d. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- e. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi

Program prioritas SKPD dan target kinerja serta lokasi program prioritas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu pengolahan hasil perkebunan karet khususnya, dengan target kinerja terlaksananya pelatihan pengolahan mutu karet yang di tujukan pada petani karet di 14 kecamatan
- b. Peningkatan mutu pengolahan makanan dan obat herbal, dengan target kinerja terlaksananya bimbingan teknis pengolahan makanan dan obat herbal yang ditujukan pada industri kecil menengah dan kelompok tani obat di 14 kecamatan
- c. Peningkatan pengawasan peredaran makanan, minuman dan produk berbahaya, dengan target kinerja terlaksananya pengawasan dan pengujian sampel pada 14 kecamatan
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat pelaku usaha dan petani akan mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) SIR, dengan target kinerja meningkatnya pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Perdagangan Bokor SIR (STPP-Bokor SIR) pada 14 Kecamatan
- e. Terlaksananya sosialisasi pembinaan SNI, dengan target kinerja sosialisasi SNI pada 14 Kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang, dan RTRW yang berhubungan dengan Tugas Pokok fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sintang terdapat Rencana Struktur ruang wilayah Kabupaten Sintang sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten berada di Sungai Ringin sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) industri terletak di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian. Sistem jaringan transportasi darat sebagai strategi penunjang peningkatan pengembangan industri yang mencakup aneka industri kecil dan besar untuk mengolah bahan baku dari hasil pertanian.

Kawasan budidaya salah satunya adalah kawasan peruntukan industri yang terdiri dari kawasan peruntukan industri besar, sedang dan rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar antara lain industri pengolahan karet, industri pengolahan tandan buah segar (TBS), industri *crumb rubber*, industri *crude palm oil* (CPO), industri kernel (inti sawit). Kawasan peruntukan industri sedang meliputi Kawasan Industri Sungai Ringin di kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sungai Tebelian. Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain IKM pangan di 14 kecamatan, IKM sandang di Sintang, Dedai, dan Kelam Permai, IKM kimia dan bahan bangunan di Kec. Sintang, IKM logam dan elektronika di Kec Sintang, Serawai, Ambalau, Tempunak, Dedai, Kelam Permai, IKM kerajinan di Kec Sintang, Kelam Permai, Tempunak, Kayan Hulu, Sepauk, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Sedangkan pengembangan industri berciri khusus untuk komoditi tenun ikat dan rotan serta industri komoditi lainnya yang menjadi ciri khusus Kabupaten Sintang.

Ketentuan umum peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya salah satunya adalah kawasan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan meliputi peningkatan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; industri tidak diperkenankan mengkonversi lahan pertanian dengan irigasi teknis; kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola dan badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata meliputi pelarangan pembangunan pemukiman dan industri yang tidak berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tahun 2012)

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) pada tahap ini perencanaan pembangunan khususnya terhadap Renstra Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan industri, ekonomi perdagangan, koperasi dengan lingkungan hidup.

Ada tiga isu dalam hal ekonomi dan kelembagaan, yaitu:

1. Banjir dan erosi, adanya perubahan terhadap struktur ruang dan pola ruang akan dapat mendorong percepatan terbukanya tutupan lahan di hulu dan di sekitar DAS Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang. Kondisi ini menurunkan kemampuan lahan untuk menahan *run off* sehingga menimbulkan debit permukaan yang sangat besar dan tidak tertampung pada DAS Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga terjadi banjir dan erosi di tempat yang lebih rendah atau di daerah hilir.
2. Konversi lahan, perubahan terhadap struktur dan pola ruang mendorong perubahan kebijakan pembangunan infrastruktur baik untuk peningkatan ekonomi wilayah maupun pemukiman. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai dampak terutama terhadap degradasi dan deforestasi, dan hal ini dapat terjadi di setiap lokus dengan aksesibilitas yang tinggi sebagai akibat perwujudan struktur ruang maupun pola ruang.
3. Kekeringan dan kebakaran hutan, perubahan lahan sebagai akibat perubahan pola ruang dapat menyebabkan pembukaan lahan yang signifikan, dan ditambah dengan adanya perubahan iklim secara global, mengakibatkan peningkatan terhadap kekeringan dan kebakaran lahan. Hal ini dapat terjadi di semua bagian yang rawan kebakaran. Seperti wilayah tanah gambut atau bergambut.
4. *Illegal trading*, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKS, PKW, jalan, pelabuhan, terminal dan bandara dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perdagangan ilegal terutama Negara tetangga yang mempunyai akses langsung melalui jalur darat. Hal ini dapat terjadi di seluruh kota dan bahkan desa.
5. Tumpang tindih perijinan, adanya perubahan pola ruang mendorong penentuan rencana sektoral menjadi berubah, dan bilamana tidak terjadi koordinasi maka akan terjadi tumpang tindih perijinan. Hal ini dapat terjadi di seluruh fokus perubahan pola ruang dari kawasan ke APL.

6. Tergesernya pasar-pasar tradisional, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKS, PKW, jalan, terminal dan bandara dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perdagangan berskala besar sehingga akan menggeser sistem pasar tradisional.
7. Konflik sosial, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKS, PKW, jalan, terminal dan bandara, dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya penambahan dan perubahan nilai-nilai sosial sehingga bilamana masyarakat belum siap dapat memicu terjadinya konflik sosial.
8. Pergeseran nilai-nilai budaya lokal/kearifan lokal/peran lembaga adat, adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk merevisi RTRW Sintang baik pada struktur ruang maupun pola ruang membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas. Dengan adanya pembukaan akses ini, maka akan terjadi pemasukan nilai-nilai baru di kawasan ini, arus masuk nilai-nilai baru tersebut menjadi tidak terbandung dan ada yang berimplikasi negatif sehingga menggeser kearifan lokal yang ada.
9. *Human Trafficking*, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKS, PKW, jalan, terminal dan bandara akan meningkatkan perdagangan manusia ke luar negeri.
10. Ekonomi dan kelembagaan, berkembangnya peradaban manusia dan lingkungannya menyangkut berbagai bidang yang harus ditangani dengan baik, seperti perdagangan ilegal dan ijin/proses perijinan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bertitik tolak pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Sintang meliputi:

1. Kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 6,47% tahun 2013 menjadi hanya 5,36% tahun 2014.
2. Terlalu dominannya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 25% PDRB dan kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari 10,62% tahun 2010 menjadi hanya 10,03% tahun 2014 serta stagnannya kontribusi sektor perdagangan di sekitar angka 17,5%.
3. Tingginya ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan oleh tingginya angka Indeks Gini yang sudah melebihi 0,4 pada tahun 2013.

4. Sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah disebabkan oleh kesulitan investor mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur.
5. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu sekitar 33% dari total 337 jumlah koperasi.
6. Sulitnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal, dimana data Bank Indonesia Triwulan I tahun 2014 menunjukkan bahwa dari Rp.16.149 triliun jumlah kredit produktif di Kalimantan Barat ternyata hanya sekitar Rp.1,25 triliun atau sekitar 7,74% yang terdistribusi di Kabupaten Sintang yang sebagian besar juga tidak dinikmati oleh koperasi dan UMKM.
7. Masih rendahnya daya saing daerah yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya pengeluaran penduduk untuk makanan dibandingkan non makanan serta kecenderungan menurunnya Nilai Tukar Premi.

Dari analisis gambaran permasalahan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, analisis renstra Kementerian terkait dan renstra Disperindagkop dan UMKM Provinsi serta hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis dan telaahan rencana tata ruang wilayah, maka kondisi atau hal-hal yang telah dikemukakan di atas, apabila keadaan tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal dapat dijabarkan ke dalam Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016
3. Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa Belum optimal
4. Penyerahan Pelimpahan Kewenangan Kemetrolagian Provinsi ke Daerah Kab/Kota.
5. Kreativitas Pelaku Usaha dan Kualitas Produk yang masih rendah.
6. Hilirisasi industri
7. Sarana dan Prasarana Penunjang industri belum memadai (Jalan, Listrik dan Air)
8. Masih adanya peredaran barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuann yang berlaku.

9. Rendahnya kualitas SDM Koperasi
10. Rendahnya akses permodalan Koperasi dan UMKM.
11. Rendahnya dan lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi
12. Masih besarnya Jumlah Koperasi Tidak Aktif

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang

4.1.1 Visi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kinerjanya tetap berpedoman pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021” dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (4) “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dan point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan Subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka perlu visi dan misi Dinas sebagai dasar untuk pengukuran kinerja maka Visi, dan Misi dirumuskan sebagai berikut :

“MENJADIKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MAJU DAN MANDIRI ”

Nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan Visi adalah :

- a. Maju yang berarti adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan dengan bertumpu pada kompetensi inti di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Mandiri yang berarti adanya perubahan sikap dan mental masyarakat untuk berusaha dari diri sendiri sehingga menciptakan jiwa kewirausahaan (entrepreneur) dan akan menimbulkan daya saing masyarakat Sintang dalam mengembangkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur Sintang yang ditunjang tata kelola yang baik.

4.1.2 Misi

Misi adalah suatu tugas yang dilaksanakan oleh aparatur sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya tugas pokok dan fungsinya dengan rencana dan strategi yang tertuang

dalam program kerja organisasi. Misi yang dibuat harus jelas dan terukur yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, maka Misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang tergambar dalam Tabel 4.1.2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang

Visi Kabupaten Sintang 2016-2021	Visi Disperindagkop UKM Kab.Sintang
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Relegius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.	Menjadikan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang maju dan Mandiri.
Misi Kabupaten Sintang 2016-2021	Misi Diperindagkop UKM Kab.Sintang
1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.	1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.	2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur	

<p>dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.</p> <p>5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p>	<p>3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.</p> <p>4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.</p> <p>5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.</p>
---	--

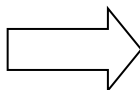
Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

C. Keterkaitan Visi dan Misi

VISI

MISI

Menjadikan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang maju dan Mandiri



1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perind
UKM Kabupaten Sintang**

4.2.1 Tujuan

Tujuan organisasi harus konsisten dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, yang menggambarkan arah strategi. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh asumsi untuk memfokuskan arah program dan aktivitas dalam melaksanakan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah:

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

4.2.2 Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, maka sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Pertumbuhan Wirausahawan
2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Jumlah UMKM
 - b. Pertumbuhan UMKM
3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Persentase koperasi aktif
 - b. Jumlah BPR / LKM

4. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
 - b. Jumlah Alat UTTP
 - c. Jumlah produk bersertifikat
 - d. Jumlah pasar tertib ukur
 - e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah
5. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Jumlah pasar rakyat
 - b. Jumlah promosi
 - c. Jumlah pedagang
 6. Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Jumlah PKL dan asongan
 7. Terwujudnya pengembangan IKM.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
 - b. Jumlah industri kecil menengah
 - c. Cakupan bina kelompok pengrajin
 8. Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Pertumbuhan IKM terlatih
 9. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri.
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Jumlah bimtek IKM
 - b. Jumlah gedung/workshop IKM
 10. Terwujudnya penataan struktur industri
Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
 - a. Jumlah REPIDA
 - b. Pertumbuhan industri
 11. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

- a. Jumlah materai
 - b. Jumlah ATK
 - c. Jumlah dokumen
 - d. Jumlah tenaga kontrak
 - e. Jumlah barang cetak dan penggandaan
 - f. Jumlah komponen listrik
 - g. Jumlah bahan bacaan
 - h. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi
 - i. Jumlah jasa kebersihan kantor
 - j. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

- a. Jumlah mebeler
 - b. Jumlah komputer dan printer
 - c. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
13. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

- a. Jumlah ASN
14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:

- a. Jumlah ASN terlatih
15. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Indikator terhadap sasaran yang hendak dicapai:
- a. Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2016-2021, terfokus pada upaya mewujudkan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, secara bertahap, merata dan berkelanjutan. Dalam

upaya mewujudkan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, maka Strategi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. **Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**, adalah Strategi Pembangunan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri serta meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi produk. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan standar hasil produksi serta mendorong pelaku usaha IKM meningkatkan daya saing di pasar global.
2. **Strategi Pengembangan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan** adalah Strategi Pembangunan dan Pengembangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Strategi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau.
3. **Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah** yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian. Strategi ini diarahkan memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang khususnya dari masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang Industri, Perdagangan dan Jasa.
4. **Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur**, adalah Strategi Pembangunan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Publik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Misi dan tujuan yang jelas, terukur dan terarah.

4.3.2 Kebijakan

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 seperti tersebut diatas dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021" dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (3)

“Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah” dan point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Maka langkah-langkah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri;
2. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa;
3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis;
4. Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan;
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;
8. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran;
9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM /IKM;
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;
11. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen;
12. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
13. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
14. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan kebijakan yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tergambar pada Tabel 4.3.2.1 berikut ini :

Tabel 4.3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang

VISI : Terwujudnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Maju dan Mandiri.			
Misi I : Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai Pilar Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai Pilar Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 2. Terwujudnya pembinaan PKL dan Asongan 	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa; b. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Misi II : Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang utama Ekonomi Pedesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang utama Ekonomi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM 3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas UMKM 2. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kemampuan UMKM 3. Meningkatkan promosi dan hasil produksi UMKM 4. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha 5. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis pada Koperasi, UMKM, IKM dan masyarakat; b. Meningkatkan Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM; c. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM; d. Meningkatkan mutu

		<p>kemampuan manajemen dan Usaha Koperasi</p> <p>6. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, bagi UMKM</p>	<p>dan diversifikasi Produk dan Pemasaran Produk Koperasi/UMKM/IKM;</p> <p>e. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/UMKM/IKM;</p> <p>f. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;</p> <p>g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>
Misi III : Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengembangan IKM 2. Terwujudnya kapasitas IPTEK sistem produksi 3. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri 4. Terwujudnya penataan struktur industri 	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Hilirisasi Industri; b. Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; c. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan perdagangan; d. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian.

Misi IV : Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	1. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terwujudnya Sentra Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal	a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa; b. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana industri dan perdagangan.
Misi V: Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif	1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 4. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Terwujudnya	1. Pelayanan prima dan tertib administrasi 2. Memelihara sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur 4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya	a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; c. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian; d. Tersedianya laporan capaian kinerja dan

	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Aparatur 5. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	keuangan.
--	--	---	-----------

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Maka Program Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan di sertai dengan kebutuhan pendanaan seperti dalam matrik di bawah ini:

5.1.1 Sekretariat

5.1.1.1 Pelayan Administrasi Perkantoran Meliputi:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- m. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- n. Pameran Pembangunan
- o. Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- p. Pendataan dan Penataan Dokumen Aset

5.1.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meliputi:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Perangkat komputer dan Printer
- d. Rehab Berat Gedung Kantor
- e. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Pengadaan AC dan Kipas Angin

5.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.1.1.4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- b. Penyusunan Laporan Akhir Tahun

5.1.1.5 Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5.1.2 Bidang Perindustrian

5.1.2.1 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

- a. Penumbuhan dan Pengembangan sentra Industri Kecil
- b. Penyuluhan Bimbingan Industri Kecil Menengah
- c. Menyelenggarakan Pameran Produk Kerajinan Rakyat, IKM, Kalbar Expo
- d. Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Daerah (REPIDA)
- e. Sosialisasi Depot air minum
- f. Pembinaan IKM langsung
- g. Desiminasi informasi produk unggulan dan teknologi tepat guna

5.1.2.2 Peningkatan Kemampuan Teknologi

1. Menyelenggarakan Bimtek Pembuat Kerajinan Rotan
2. Pengembangan Industri Hilir Karet (Pembuatan Ban dan sarung Tangan)
3. Melakukan Pengawasan dan Pengujian bahan baku industri
4. Menyelenggarakan Bimtek *Packing* makanan dan minuman.
5. Menyelenggarakan bimtek modifikasi Bordir dan Fashion, bata merah, tenun ikat, nata de coco, pandai besi, pengolahan jagung, cabe, tepung tapioka
6. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana industri
7. Peningkatan Pengembangan Produk IKM (Rotan, Cabe, Gula aren, tenun Ikat, fashion, ikan, tahu, nata de coco)
8. Sosialisasi pembuatan PIRT, sertifikasi halal dan HKI

5.1.2.3 Penataan Struktur Industri

1. Monitoring dan pendataan usaha industri
2. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan IKM

3. Melakukan Latihan Kerja ke sentra yang lebih maju
4. Peningkatan sarana dan Prasarana gedung Galeri
5. Pengembangan kompetensi Inti Industri Daerah
6. Gugus kendali Mutu Pengujian Mutu Produksi Kompos
7. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Industri
8. Bantuan Mesin Peralatan IKM (Pengolahan Cabe, Gula Aren, batako pres, mesin jahit, mesin tebu, mesin kopi bubuk, mesin pres sampah anorganik)
9. Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan.
10. Pembangunan IKM dan Kawasan IKM serta utilitasnya

5.1.2.4 Penyuluhan Perindustrian Dan Perdagangan

1. Gugus Kendali Mutu bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

5.1.2.5 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

1. Pengadaan mesin pencacah sampah anorganik
2. Pengadaan mesin pres sampah anorganik
3. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

5.1.3 Bidang Perdagangan

5.1.3.1 Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

1. Monitoring harga kebutuhan pokok
2. Pengawasan pupuk dan BBM bersubsidi
3. Monitoring Peredaran barang dan jasa
4. Pembentukan BPSK
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPSK
6. Monitoring dan Pemantauan barang Kadaluarsa dan Kelengkapan Label
7. Sosialisasi UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
8. Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang
9. Fasilitasi Pembentukan LPKBM
10. Pendidikan dan Pelatihan Penera/Calon Penera

5.1.3.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Pembangunan UPT Metrologi Legal
2. Pendidikan dan pelatihan Kemetrolgian
3. Pengadaan Alat UTTP
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal

5. Pemantauan/Pengawasan Penggunaan Alat Ukur ,Takar, Timbang dan Peralatannya
6. Kegiatan Tera/tera Ulang Alat UTTP
7. Sosialisasi UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
8. Pembentukan Pasar tertib Ukur
9. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang Nasional
10. Pengadaan Unit Laboratorium Pengujian Mutu Barang Berjalan
11. Forum Konsumen Cerdas
12. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
13. Pengawasan/Pemantauan Mutu Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya
14. Pemantauan/Pengawasan Produk Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
15. Monitoring terhadap makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya
16. Operasi Pasar
17. Fasilitasi Pasar Murah
18. Pemantauan Stok Kebutuhan Pokok melalui Penguatan jaringan Distribusi
19. Pendidikan/Pelatihan Penyusunan prognosa bahan pokok
20. Fasilitasi Kemitraan Usaha Perdagangan.
21. Sosialisasi terhadap Produk Hukum Pemerintah atau PERDA
22. Partisipasi pada Pameran Produk di dalam dan Luar Negeri
23. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
24. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian

5.1.4 Bidang Pasar

5.1.4.1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan: Pembangunan Pasar Kios/Los Desa Mangkurat Baru Kecamatan Tempunak, Pembangunan Pasar Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Pembangunan Pasar Nanga Tikan Kecamatan Kayan Hilir, Pembangunan Pasar Rakyat Lingkar Kelam, Pembangunan Pasar Rakyat Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian, Pembangunan Pasar Daging Babi Kecamatan Sintang, Pembangunan Pasar Sementara Terminal Tanjung Puri
2. Revitalisasi Pasar Kios/Los: Pasar Terminal Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Pasar Serawai Kecamatan Serawai, Pasar Tebidah Kecamatan

Kayan Hulu dan Revitalisasi Pasar/Kios Nanga Senaning Kecamatan Ketungau Hulu.

3. Pemasangan jaringan Listrik
4. Penyusunan Kajian Akademik Draft Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
5. Kaji Terap Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
6. Penyusunan Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Sintang
7. Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah
8. Pendataan dan Penataan Pedagang dan PKL di Kabupaten Sintang
9. Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar
10. Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pasar Pemerintah
11. Penetapan Kawasan Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL)
12. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Pasar dan pengelolaannya
13. Pendataan dan Penempatan Pedagang Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Sintang
14. Pendataan dan Pelayanan Restribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
15. Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

5.1.4.2 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1. Pendataan, Penataan dan Fasilitasi bagi PKL dan Asongan di Kab. Sintang
2. Penyuluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan

5.1.5 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5.1.5.1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dan Penilaian Kelayakan Usaha UMKM
2. Pengawasan Koperasi Penerima Fasilitas bantuan
3. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
4. Pembinaan administrasi dan Manajemen Koperasi

5. Sosialisasi Prinsip Prinsip Koperasi
6. Pendataan Koperasi
7. Pelatihan Perkoperasian Bagi Kader Koperasi

5.1.5.2 Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Fasilitasi Pembiayaan UMKM dan Koperasi pada Koperasi, Perbankan dan Lembaga lainnya
2. Fasilitasi Bantuan Modal Usaha Simpan Pinjam
3. Sosialisasi Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

5.1.5.3 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

1. Fasilitas Peningkatan Kemitraan UMKM.
2. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan/Pasca Bencana
3. Memfasilitasi Standarisasi & Mutu Produk UMKM
4. Pelatihan Manajemen Pengelola/ Koperasi/KUD

5.1.5.4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

1. Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
2. Pelatihan Pengembangan SDM bagi Penggerak Ekonomi Kerakyatan.
3. Pelatihan Teknis Ketrampilan Tenun Ikat Dayak
4. Pelatihan Tehnis Ketrampilan Menjahit.
5. Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.
6. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.
7. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM
8. Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada KUKM
9. Penyelenggaraan Promosi & Pameran Produk KUMKM
10. Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro Kecil.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

SKPD TAHUN 2016 - 2021
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

		kebersihan kantor, Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																								
			2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku Cek Bank	582 Lembar	582 Lb r,1 Bk	3.409.000	582 Lb r,1 Bk	3.749.000	582 Lb r,1 Bk	4.123.900	582 Lb r,1 Bk	4.536.300	582 Lb r,1 Bk	4.989.900	582 Lb r,1 Bk	5.488.900	3.492 Lb r,6 Bk	26.297.000	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg

			20000	06612	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	49.500.000	12 Bulan	54.450.000	12 Bulan	59.895.000	12 Bulan	65.884.500	12 Bulan	72.472.950	12 Bulan	79.720.200	72 Bulan	381.922.650	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg
			20000	06616	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2	4 Unit	4 Unit	4.800.000	5 Unit	5.280.000	5 Unit	5.808.000	7 Unit	6.388.800	7 Unit	7.027.700	7 Unit	7.730.500	35 Unit	37.035.000	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg

							onal																			
			2	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor	17 Jenis	14 Jenis, 1 Org	17.105.750	14 Jenis, 1 Org	18.816.300	14 Jenis, 1 Org	5.808.000	14 Jenis, 1 Org	6.388.800	14 Jenis, 1 Org	7.027.700	14 Jenis, 1 Org	7.730.500	84 Jenis, 6 Org	62.877.050	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg
			2	0	0	0	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	42 Jenis	31 Jenis	54.240.000	31 Jenis	59.664.000	31 Jenis	65.630.400	31 Jenis	72.193.400	31 Jenis	79.412.700	31 Jenis	87.353.900	186 Jenis	418.494.400	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg
			2	0	0	0	1	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Barang dan Cetak	62.000 Lbr dan 4 Jen	65.000 Lbr, 5	33.720.000	65.000 Lbr, 5	37.092.000	65.000 Lbr, 5	40.801.200	65.000 Lbr, 5	44.881.300	65.000 Lbr, 5	49.369.400	65.000 Lbr, 5	54.306.300	390.000 Lbr, 1	260.170.200	Diserindagkop dan UK	Kab. Sdg

							uran Peru ndan g- Unda ngan																		
			2	0	0	0	1	Peny ediaa n Maka nan dan Minu man	Juml ah Nasi Kota k dan Sna ck	1.7 16 36 8	1. 36 8 Kot ak Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	1. 36 8 Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	1. 36 8 Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	1. 36 8 Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	24. 552 8 Ko ta k	8. 20 8 Ko ta k	147. 312. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2	0	0	0	1	Rapa t- Rapa t Koor dinas i dan Kons ultasi Kelu ar Daer ah	Juml ah Kon sulta si dan Koor dina si Rap at Dilu ar Kab upat en	48 Kali	51 Ka li	463 .31 0.0 00	51 Ka li	463 .31 0.0 00	51 Ka li	463 .31 0.0 00	51 Ka li	463 .31 0.0 00	51 Ka li	463 .31 0.0 00	463 .31 0.0 00	30 6 Ka li	2.77 9.86 0.00 0	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg

									dan Luar Prov insi															
			2	0	0	0	2	Pend ataan dan Pena taan Doku men/ Arsip Daer ah	Juml ah Box Arsip	40 Box	90 Bo x	12. 758 .00 0	90 Bo x	12. 758 .00 0	90 Bo x	12. 758 .00 0	90 Bo x	12. 758 .00 0	90 Bo x	12. 758 .00 0	54 0 Bo x	76.5 48.0 00	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2	0	0	0	2	Perin gatan Hari Besar Nasi onal	Juml ah Perl eng kap an HBN	38 Bua h dan 22 Hel ai	30 Bu ah , 10 3 M	17. 535 .00 0	30 Bu ah , 10 3 M	17. 535 .00 0	30 Bu ah , 10 3 M	17. 535 .00 0	30 Bu ah , 10 3 M	17. 535 .00 0	30 Bu ah , 10 3 M	17. 535 .00 0	18 0 Bu ah , 61 8 M	105. 210. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2	0	0	0	2	Pam eran Pem bang unan	Juml ah Pam eran Pem ban gun an	1 Kali	1 Ka li	122 .87 2.0 00	1 Ka li	122 .87 2.0 00	1 Ka li	122 .87 2.0 00	1 Ka li	122 .87 2.0 00	1 Ka li	122 .87 2.0 00	6 Ka li	737. 232. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg

			20003	Pembinaan Kedalam Daerah	Jumlah Kunjungan Pembinaan	25 Kali	38 Kali, 1 Dok	52.883.000	38 Kali, 1 Dok	52.883.000	38 Kali, 1 Dok	52.883.000	38 Kali, 1 Dok	52.883.000	38 Kali, 1 Dok	52.883.000	228 Kali, 6 Dok	317.298.000	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg
			20004	Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	Jumlah Tenaga Honororer	6 Orang	9 Orang	136.800.000	9 Orang	136.800.000	9 Orang	136.800.000	9 Orang	136.800.000	9 Orang	136.800.000	54 Orang	820.800.000	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg
			20004	Pendataan dan Pemutahiran Aset	Jumlah Pendataan Aset	1 Dokumen	1 Dokumen	21.480.000	1 Dokumen	21.480.000	1 Dokumen	21.480.000	1 Dokumen	21.480.000	1 Dokumen	21.480.000	6 Dokumen	128.880.000	Diserindagkop dan UK	Kab. Sdg

							Data Aset	Disperindagkop dan UKM														M				
			2	0	0	0	4	Penyediaan BBM dan Gas	Jumlah BBM Roda 4 dan 6	6.750 Ltr	6.870.00	6.750 Ltr	6.870.00	6.750 Ltr	6.870.00	6.750 Ltr	6.870.00	6.750 Ltr	6.870.00	40.500 Ltr	413.220.000	Disperindagkop dan UKM	Kab. Sdg			
			2	0	0	0	X	Penyelenggaraan Pamoran Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pamoran	0	0	0	0	0	2 kali	100.000	2 kali	100.000	2 kali	100.000	2 kali	100.000	8 kali	400.000	Disperindagkop dan UKM	Kab. Sdg

			2000	X	Monit oring dan Evalu asi Pelak sana an Kegi atan Perin dagk op dan UKM	Juml ah Pela ksan aan Mon ev	0	0	0	0	0	1 Do k	50. 000 .00 0	1 Do k	50. 000 .00 0	1 Do k	50. 000 .00 0	1 Do k	50. 000 .00 0	4 Do k	200. 000. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2000	8	Peny usun an Profil Perin dustri an dan Perd agan gan	Juml ah Buku profil Perin dustri an dan Perd agan gan dan UK M	-	1 Do k	42. 523 .00 0	1 Do k	42. 523 .00 0	1 Do k	42. 523 .00 0	1 Do k	42. 523 .00 0	1 Do k	42. 523 .00 0	5 Do k	42. 523 .00 0	255. 138. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg	

							araan Dinas/ Operasi onal	an Dinas			0		00		00		00		00		0	dan UK M	tg	
			2	0	0	0	0	Peng adaa n Perle ngka pan Gedu ng Kant or	Juml ah Perl eng kap an Kant or	-	5 Un it	33. 180 .00 0	10 Un it	65. 000 .00 0	10 Un it	65. 000 .00 0	10 Un it	65. 000 .00 0	10 Un it	33. 180 .00 0	55 Un it	326. 360. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2	0	0	0	1	Peng adaa n Pera lata n dan Perle ngka pan Kant or	Juml ah Pera lata n dan perl eng kap an kant or	109 Bua h dan 40 Unit	12 Bu ah	13. 500 .00 0	12 Bu ah	13. 500 .00 0	12 Bu ah	13. 500 .00 0	12 Bu ah	13. 500 .00 0	12 Bu ah	13. 500 .00 0	72 Bu ah	81.0 00.0 00	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2	0	0	0	2	Pem eliha r	Terp eliha	4 Unit	4 Un	18.	4 Un	18.	4 Un	18.	4 Un	18.	4 Un	18.	24 Un	113.	Disp erin	K a

							aan Rutin /Berkala Kendaraan dinas /Operasional	ranya Kendaraan Dinas		it	961.000	it	961.000	it	961.000	it	961.000	it	961.000	it	766.000	dag kop dan UKM	b. S tg
			20001	06621	00001	1	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	7 unit	7 Unit	12.650.000	7 Unit	12.650.000	7 Unit	12.650.000	7 Unit	12.650.000	7 Unit	12.650.000	42 Unit	75.900.000	Diserindag kop dan UKM	K a b. S tg
			20009	06628	00009	8	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana Gedung Kantor	-	1 Pkt	50.000.000	1 Pkt	50.000.000	1 Pkt	50.000.000	1 Pkt	50.000.000	1 Pkt	50.000.000	6 Pkt	300.000.000	Diserindag kop dan UKM	K a b. S tg

							aran a Gedu ng Kant or	or																
			2	0	0	0	5	Peng adaa n Pera ngkat Kom puter dan Print er	Ters edia nya Kom pute r dan Print er	4 Unit	12 Un it	36. 530 .00 0	10 Un it	64. 300 .00 0	10 Un it	64. 300 .00 0	10 Un it	64. 300 .00 0	10 Un it	64. 300 .00 0	62 Un it	358. 030. 000	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg
			2	0	0	0	5	Pem eliha raan Pera ngkat Kom puter dan Print er	Terp eliha ranya pera ngk at kom pute r dan print er	10 Unit	10 Un it	7.2 00. 000	10 Un it	7.2 00. 000	10 Un it	7.2 00. 000	10 Un it	7.2 00. 000	10 Un it	7.2 00. 000	62 Un it	43.2 00.0 00	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg

Me wuj udk an Ap ara tur Din as Per ind agk op dan UK M yan g Pro fesi ona l dan Kre atif	Ter wuju dny a peni ngk atan disip lin apar atur	Jum lah ASN	2	0 6	0 6	0 3	Program Peningk atan Disiplin Aparatur	Men ingkatny a Kual itas Disi plin Apar atur																
			2	0 6	0 6	0 3	0 1	Peng adaa n Pakai an	Juml ah Pak aian Olah	62 Stel	0	0	53 St el	23. 850 .00 0	53 St el	23. 850 .00 0	53 St el	23. 850 .00 0	53 St el	23. 850 .00 0	15 9 St el	71.5 50.0 00	Disp erin dag kop dan	K a b. S tg

tur Din as Per ind agk op dan UK M yan g Pro fesi ona l dan Kre atif	ban gan siste m pela pora n cap aian kine rja dan keu ang an	ran kine rja dan keu ang an					Pelapor an Capaian Kinerja dan Keuanga n	Pen gem ban gan Sist em Pela pora n Cap aian Kine rja dan Keu ang an																
			2	0	0	0	1	Peny usun an Lapo ran Keua ngan Sem ester an	10 Buk u		10 Bu ku	1.1 47. 750	10 Bu ku	1.1 47. 750	10 Bu ku	1.1 47. 750	10 Bu ku	1.1 47. 750	10 Bu ku	1.1 47. 750	60 Bu ku	6.88 6.50 0	Disp erin dag kop dan UK M	K a b. S tg

			20000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Buku		10 Buku	1.392.400	10 Buku	1.392.400	10 Buku	1.392.400	10 Buku	1.392.400	10 Buku	1.392.400	10 Buku	1.392.400	60 Buku	8.354.400	Diserindagkop dan UKM	Kab. Sdg
TOTAL								1.725.435.900		2.374.922.650		2.112.820.050		2.131.656.050		2.152.375.700		2.143.347.250		12.392.697.600		

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD TAHUN 2016 - 2021

Tujan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode	Unit Kerja SKPD	Lokasi
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			

								Pr ogr am (ou tco me) da n Ke gia tan (ou tpu t)	da Ta hu n Aw al Pe ren ca na an (20 15)									Renstra PD		Pe nan ggu ng jaw ab							
										ta rg et	Rp	ta rg et	Rp	ta rg et	Rp	ta rg et	Rp	ta rg et	Rp			ta rg et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Me nu mb uhk an Ind ustri Kec il dan Me nen gah	Ter wuj udn ya pen ing kat an ke ma mp uan tek	Jum lah bimt ek IKM , Jum lah ged ung /wor ksh op	2	0	2	0	0	1	1	10. 03	1 0. 1 0		1 0. 2 5		1 0. 3 5		1 0. 4 5		1 0. 5 5		1 0. 6 5		1 0. 7 5				

kar et pek at	ks kar et pek at																											
Ter uj udn ya kap asit as SD M pela ku usa ha bat a mer ah	Me nin gka tny a kap asit as SD M pel aku usa ha bat a me rah		2	0	2	0	0	1	x	Bimbi ngan Teknis Bata Merah	ju ml ah pel ak u us ah a bat a me rah	0	0	0	1	65. 000 .00 0	2	70. 000 .00 0	2	75.0 00.0 00	3	78. 000 .00 0	4	81. 000 .00 0	1	369 00 .00 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Desa Empa ru Baru Kec.D edai
Me ning katn ya pen get ahu	Pe ngr ajin ten un ikat		2	0	2	0	0	1	x	Bimte k Tenun ikat	Ju ml ah pel ak u IK	0	0	0	1	40. 000 .00 0	1	44. 000 .00 0	1	48.4 00.0 00	1	53. 240 .00 0	1	58. 564 .00 0	5	244 00 .20 4.0 00	Dis peri nda gko p dan	Kab. Sinta ng

an pen graji n ten un ikat										M ten un ika t														UK M		
Me ning katn ya kem am pua n pela ku usa ha	Pel aku usa ha ind ustr i kec il ma kan an dan ker ajin an		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7 x	x	Bimte k Indust ri Panga n dan Kuline r	Ju ml ah pel ak u IK M	0	0	0	2 0 or g	100 .00 00	2 0 or g	110 .00 00	2 0 or g	121. 000. 000	2 0 or g	133 .10 00	2 0 or g	146 .41 00	1 0 or g	610 .51 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kab. Sinta ng
Me ning katn ya kem am pua	Pel aku usa ha IK M fas		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7 x	x	Bimte k Modifi kasi Bordir dan Fashi	Ju ml ah pel ak u IK	0	0	0	2 0 or g	65. 000 .00 0	2 0 or g	71. 500 .00 0	2 0 or g	78.6 50.0 00	2 0 or g	86. 515 .00 0	2 0 or g	95. 166 .50 0	1 0 or g	396 .83 1.5 00	Dis peri nda gko p dan	Kab. Sinta ng

n pela ku usa ha fash ion	hio n								on (pelati han menja hit)	M fas hio n/t ek stil														UK M			
Me ning katk an pen get ahu an pela ku usa ha lada	Pel aku usa ha lada	2	0 7	2	0 6	0	1 7	x	Bimbi ngan Teknis dan Bantu an Packi ng Pengo lahan Tepun g Lada	Ju ml ah Kel om po k IK M tep un g lada	0	0	0	5 ke lo m p ok	65. 000 .00 0	5 K el o m p ok	71. 500 .00 0	5 ke lo m p ok	78.6 50.0 00	5 ke lo m p ok	86. 515 .00 0	5 ke lo m p ok	95. 166 .50 0	2 5 ke lo m p ok	396 .83 1.5 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec. Ket. Teng ah dan Kec. Ket. Hulu
Me ning katk an pen get ahu an pela sil	Pel aku UK Ma kaa n Ha sil	2	0 7	2	0 6	0	1 7	x	Bimbi ngan Teknis Pengo lahan Maka nan Hasil Ikan	Ju ml ah pel ak u IK M ma	0	0	0	1 5 or g	65. 000 .00 0	1 5 or g	71. 500 .00 0,0 0	1 5 or g	78.6 50.0 00,0 0	1 5 or g	86. 515 .00 0	1 5 or g	95. 166 .50 0,0 0	7 5 or g	396 .83 1.5 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec. Sinta ng dan Kec. Ket. Teng ah

ku usa ha mak ana n hasi l ikan	lka n									ka na n																
Me ning katn ya kem am pua n pela ku usa ha IKM Nat a de coc o	Pel aku IK M Nat a de Co co		2 0 7	2 0 6	0 1 7	1 x x	Bimbi ngan Teknis Pengo lahan Nata De Coco	Ju ml ah pel ak u IK M nat a de co co	0	0	0	2 0 or g	50. 000 .00 0	2 0 or g	55. 000 .00 0	2 0 or g	60.5 00.0 00,0 0	2 0 or g	66. 550 .00 0	2 0 or g	73. 205 .00 0	1 0 or g	305 .25 5.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kab. Sinta ng	

Me ning katn ya pen get ahu an IKM mak ana n me nge nai peri zina n	Pel aku IK M Ma kan an		2	0	2	0	0	1	x	Sosiali sasi Pemb uatan Perus ahaan Indust ri Ruma h Tangg a (PIRT) Sertifi kasi Halal , Hak Kelay akan Intelek tual (HKI)	Ju ml ah pel ak u IK M ma ka na n	0	0	0	2	40. 000 .00 0	2	44. 000 .00 0	2	48.4 00.0 00	2	53. 240 .00 0	2	58. 564 .00 0	1	244 .20 4.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kab. Sinta ng
Me ning katn ya kem am pua n	Pel aku IK M Ma kan an		2	0	2	0	0	1	x	Pelati han Tekno logi Pengo lahan Panga n	Ju ml ah pel ak u IK M	0	0	0	2	50. 000 .00 0	2	55. 000 .00 0	2	60.5 00.0 00	2	66. 550 .00 0	2	73. 205 .00 0	1	305 .25 5.0 00	Dis peri nda gko p dan UK	Kab. Sinta ng

pen gola han pan gan tep at guna									Tepat Guna Berda sarka n Prinsip B2SA (Bera gam, Bergiz i, Seimb ang)	ma ka na n														M		
Me ning katn ya pen get ahu an IKM pen gola h jagu ng	Pel aku usa ha pen gol ah tep ung jag ung		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7	x x	Bimte k Pengo lahan Tepun g Jagun g	Ju ml ah pel aku im tep ung jag un g	0	0	0	1 5 or g	35. 000 .00 0	1 5 or g	38. 500 .00 0	1 5 or g	42.3 50.0 00	1 5 or g	46. 585 .00 0	1 5 or g	51. 243 .50 0	7 5 or g	213 .67 8.5 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kab. Sinta ng

Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	Kelompok Pengerajinan Rotan		207	206	0017	x	Bimbingan teknis pengolahan Rotan	Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Rotan	0	0	0	250	75.000.000	300	82.500.000	0	0	400	83.000.000	0	0	950	240.500.000	Dispenda gkop dan UKM	Kec.Sintang dan Kec.Ambalu
Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	Kelompok Pengolahan Tepung Tapioka		207	206	0017	x	Bimbingan Teknis Tepung Tapioka/Singkong	Jumlah Peserta Bimtek Tepung Tapioka	0	0	0	150	65.000.000	0	0	250	75.000.000	0	0	400	81.000.000	800	221.000.000	Dispenda gkop dan UKM	Kec.Binjai Hulu, Kec.Sei.Tebelian, Kec.Dedai dan Kec.Kayan Hilir

										ka																
Me ning katn ya Ke ma mp uan Tek nolo gi Ind ustri	Kel om pok Pa nda i Be si		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7 x	x	Bimbi ngan Teknis Panda i Besi	Ju ml ah Pe ser ta Bi mt ek Pa nd ai Be si	0	0	0	1 0 or g	70. 000 .00 0	0	0	1 5 or g	75.0 00.0 00	2 0 or g	76. 500 .00 0	0	0	4 5	221 .50 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec.D edai dan Kec. Sei Tebeli an
Me ning katn ya Ke ma mp uan Tek nolo gi	Kel om pok Pe ngo lah an Ta hu		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7 x	x	Bimbi ngan Teknis Peningkata n Pemb uatan Pengo lahan Tahu	Ju ml ah Pe ser ta	0	0	0	2 0 or g	70. 000 .00 0	2 0 or g	75. 000 .00 0	0	0	2 0 or g	80. 000 .00 0	2 0 or g	75. 000 .00 0	8 0	300 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec.S intang

Ind ustri																															
Me ning katn ya Ke ma mp uan Tek nolo gi Ind ustri	Kel om pok Pe mb uat an Me ube l Ka yu		2	0	2	0	0	1	x	Penin gkata n Sumb er Daya Manu sia Tekno logi Pemb uatan Meub el Kayu.	Ju ml ah Pe ser ta	0	0	0	1	50. 000 .00 0	0	0	1	5 or g	60.0 00.0 00	0	0	1	5 or g	85. 500 .00 0	4	5 or g	195 .50 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec.K ayan Hilir, Kec.K et.Hul u dan Kec.A mbala u
Me ning katn ya Ke ma mp uan Tek nolo	Kel om pok Pe ngo lah an Jag ung		2	0	2	0	0	1	x	Bimbi ngan Teknis Pengo lahan Jagun g	Ju ml ah Pe ser ta	0	0	0	1	55. 000 .00 0	0	0	1	0 or g	53.0 00.0 00	1	5 or g	55. 000 .00 0	0	0	3	5	163 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec.S intang

Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penyulingan Minyak Atsiri		207	206	0017	x	Pengadaan Mesin Penyulingan Minyak Atsiri	Jumlah Kelompok	0	0	0	0	0	5	132.00	0.00	0	0	5	135.60	0.00	0	0	1	267.60	0.00	Disperindagkop dan UKM	Kec.Sintang, Kec.Dedai, Kec.Ambalau, Kec.Sepauk dan Kec.Binjai Hulu
Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penerimaan Bantuan Alat Pembuatan Tahu		207	206	0017	x	Bantuan Alat Pembuatan Tahu	Jumlah Kelompok	0	0	0	3	120.00	0.00	0	0	5	125.000.000	0	0	6	130.00	0.00	1	375.00	0.00	Disperindagkop dan UKM	Kec.Sepauk, Kec.Kayan Hilir, Kec.SeiTebelian

	hu																											
Me ning katn ya Pen ata an Stru ktur Ind ustri	Kel om pok Pe neri ma Ba ntu an Me sin Bat ako Pre s		2 7	0	2 6	0	0 1	1 7	x x	Penga daan Mesin Batak o Press	Ju ml ah Kel om pok	0	0	0	0	0	7	250 .00 0.0 00	0	0	7	255 .00 0.0 00	0	0	1 4	505 .00 0.0 00	Dis peri nda ngko p dan UK M	Kec.S intang , Kec.K elam Permai ,Kec. Dedai dan Kec.B injai Hulu
Me ning katn ya Pen ata an Stru ktur Ind ustri	Kel om pok Pe neri ma Ba ntu an Me sin		2 7	0	2 6	0	0 1	1 7	x x	Penga daan Mesin Tapio ka	Ju ml ah Kel om pok	0	0	0	6	165 .00 0.0 00	-	0	6	170. 000. 000	0	0	0	0	1 2	335 .00 0.0 00	Dis peri nda ngko p dan UK M	Kec.S epauk ,Kec. Dedai Kec.S ei.Te belian

	Ta pio ka																										
Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penerima Bantuan Mesin Kopi Bubuk		207	206	017	x	x	Pengadaan Mesin Kopi Bubuk	Jumlah Kelompok	0	0	0	3	150.000.00	0	0	5	155.000.000	0	0	0	0	8	305.000.00	Dispenda dan UKM	Kec.Sepauk .Kec. Sintang dan Kec. Ambalau	
Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penerima Bantuan Mesin Jahit		207	206	017	x	x	Pengadaan Mesin Jahit	Jumlah Kelompok	0	0	0	0	5	200.000.00	0	0	7	250.000.00	0	0	1	450.000.00	Dispenda dan UKM	Kec.Sintang .Kec. Dedai dan Kec.Ambalau		

ustri	sin Jah it																										
Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penerima Bantuan Mesin Pengolahan Ikan		202017		20617		17	xx	Pengadaan Alat/Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan	Jumlah Kelompok	0	0	0	4	250.000	0	0	6	268.500	0	0	0	0	10	518.000	Dispendagopdan UKM	Kec.Ambalu, Kec.Sintang dan Kec.Sepauk
Meningkatnya Penataan Struktur	Kelompok Penerima Bantuan		202017		20617		17	xx	Pengadaan Mesin Tebu	Jumlah Kelompok	0	0	0	5	158.000	0	0	5	260.000	0	0	5	280	15	698.000	Dispendagopdan UKM	Kec.Dedai, Kec.Sintang, Kec.Sei.Tebelian dan

Ind ustri	Me sin Te bu																							Kec.S epauk		
Me ning katn ya Pen ata an Stru ktur Ind ustri	Kel om pok Pe neri ma Ba ntu an Me sin Jag ung		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7 x		Penga daan Mesin Jagun g	Ju ml ah Kel om po k	0	0	0	5 ke lo m p ok	155 .00 0.0 00	0	0	5 ke lo m p ok	165. 000. 000	0	0	5 ke lo m p ok	180 .00 0.0 00	1 5 ke lo m p ok	500 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec.S ei.Te belian , Kec.S intang , Kec.S epauk , Kec.D edai dan Kec.B injai Hulu
Me ning katn ya Pen ata an Stru ktur	Kel om pok Pe neri ma Ba ntu		2 0 7	2 0 6	0 0 1	1 7 x		Bantu an Perala tan Panda i Besi	Ju ml ah Kel om po k	0	0	0	6 ke lo m p ok	125 .00 0.0 00	0	0	6 ke lo m p ok	130. 000. 000	0	0	0	0	1 2 ke lo m p ok	255 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec.S epauk , Kec.D edai, Kec.B injai Hulu

Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penerima Bantuan Mesin Pembuatan Tepung Lada	207	206	017	xx	Mesin Pembuatan Tepung Lada	Jumlah Kelompok	0	0	0	0	0	6	150.000	0	0	6	155.000	0	0	12	305.000	Dispenda dan UKM	Kec.Kelam Permai, Kec.Dedai, Kec.Sepauk dan Kec.Binjai Hulu
Meningkatnya Penataan Struktur Industri	Kelompok Penerima Bantuan Mesin Pengolahan Cabe	207	206	017	xx	Mesin Pengolahan Cabe	Jumlah Kelompok	0	0	0	2	150.000	0	0	2	155.000	0	0	0	0	4	305.000	Dispenda dan UKM	Kec.Kayan Hilir, Kec.Sintang dan Kec.Ambalau

di Ped esa an aga r dap at ber sain g di Pas ar Glo bal																											
Me ning katk an pert um buh an eko no mi	Me nin gka tny a inv est asi yan g ber bas is pot ens		2 7	2 0	0 6	0 1	1 8	x	Monit oring dan Penda taan Usaha Indust ri	Ju ml ah IK M	20 3 IK M	0	0	6 0 IK M	42. 000 .00 0	7 5 IK M	48. 000 .00 0	8 5 IK M	53.0 00.0 00	9 0 IK M	58. 000 .00 0	1 0 IK M	63. 000 .00 0	4 1 0 IK M	264 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	14 Keca mata n

	i ung gul an lok al																										
Ter wuj udn ya sent ra pert um buh an eko no mi ber basi s keu ngg ulan loka l	Me nin gka tny a sen tra per tum buh an eko no mi ber bas is keu ngg ulan loka l	2	0 7	2	0 6	0	1 8	x x	Penga wasan dan Pema ntaua n Prose s Produ ksi,Pe ralata n Terha dap Pelak u usaha AMDK dan DAMI U	ju ml ah IK M	0	0	0	4 0 IK M	43. 000 .00 0	5 0 IK M	47. 000 .00 0	6 0 IK M	49.0 00.0 00	7 0 IK M	56. 000 .00 0	7 8 IK M	68. 000 .00 0	2 9 IK M	263 .00 0.0 00	Dis peri nda ngko p dan UK M	12 Keca mata n

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal		202018x	Penyusunan REPI DA	Jumlah REPI DA	0	0	0	1	89.000.000	1	110.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	1	148.000.000	5	607.000.000	Dispendagkop dan UKM	Sintang
Meningkatkan pertumbuhan	Meningkatnya daya saing		202018x	Peningkatan Sarana dan Sarana Gedung	Jumlah Sarana dan Sarana	0	1	44	2	55.000.000	3	58.900.000	3	63.325.000	4	66.350.000	5	70.671.000	1	359.1500	Dispendagkop dan UKM	Sintang

eko no mi	ng pot ens i ung gul an dae rah								ng Galeri	pra sar an a gal eri																	
Me ning katk an pert um buh an eko no mi	Me nin gka tny a inv est asi yang ber bas is pot ens i ung gul an lok al	2	0	2	0	0	1	x	Pema ntau an, Pen genda lian dan Penga wasan Perizi nan IUI dan TDI terhad ap perus ahaan AMDK , AMIU , Karet dan	Ju ml ah IK M	50 IK M	6 IK M	42 .3 71 .5 00	7 5 IK M	47. 820 .00 0	8 5 IK M	51. 110 .00 0	9 0 IK M	54.8 34.0 00	1 0 IK M	58. 660 .00 0	1 2 5 IK M	61. 751 .00 0	4 7 5 IK M	316 .54 6.5 00	Dis peri nda gko p dan UK M	14 Keca mata n

									sawit																		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal		2020018x	07	20618x				Monitoring dan Evaluasi usaha Industri	Jumlah IKM	0	60	33.580750	70	36.2200	80	39.7300	90	43.561.000	10	55.9920	15	64.0000	45	273.083750	Dispenda dan UKM	14 Kecamatan

Me mbi na dan Me nge mb ang kan IKM	Kel om pok IK M		2	0	2	0	0	1	x	Pembi naan dan Penge mban gan Indust ri Kecil Mene ngah	Ju ml ah kel om pok	6	0	0	1	70.	1	77.	1	84.7	1	93.	1	102	5	427	Dis peri nda gko p dan UK M	Kabu paten Sinta ng
Me ning katk an kem am pua n pela ku IKM	Pel aku IK M		2	0	2	0	0	1	x	Latiha n Kerja Ke Sentra Yang Lebih Maju	Ju ml ah pel ak u IK M	0	0	0	1	100	1	110	1	121.	1	133	1	146	9	610	Dis peri nda gko p dan UK M	Cireb on, Kubu Raya, Jepa ra, Cilac ap
Me ning katn ya pen get ahu an	Sis wa SM K		2	0	2	0	0	1	x	Fasilit asi dan Kerjas ama denga n sekola	Ju ml ah Sis wa S M K	0	0	0	2	50.	2	55.	2	60.5	2	66.	2	73.	1	305	Dis peri nda gko p dan UK	Kec. Sinta ng

sis wa SM K									h keju ru an															M		
Me ning katn ya pert um buh an eko no mi	Per da Per ind ustr ian		2 0 7	2 0 6	0 1 8	1 x x		Peng kaj an sar an a maup un pras ar ana klaster indust ri	Ju ml ah per da	0	0	0	0	0	1 p er da a	200 .00 0.0 00	0	0	0	0	0	0	1 P er da a	200 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kabu paten Sinta ng
Me ning katn ya pert um buh an eko no mi	Sar ana dan Pra sar ana KII D		2 0 7	2 0 6	0 1 8	1 x x		Peny edia an sar an a maup un pras ar ana klaster indust ri	Ju ml ah KII D	0	0	0	0	0	0	0	1 KI ID	500. 000. 000, 00	0	0	0	0	1 KI ID	500 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kabu paten Sinta ng
Me ning katn	Ro ad ma		2 0 7	2 0 6	0 1 8	1 x x		Peng kaj an roadm	Ju ml ah	0	0	0	0	0	1 d ok	250 .00	0	0	0	0	0	0	1 D ok	250 .00	Dis peri	Kabu paten Sinta

ya pert um buh an eko no mi	p Ka wa san Ind ustr i								ap Kawa san Indust ri	do ku me n						u m e n	0.0 00					u m e n	0.0 00	nda gko p dan UK M	ng			
Me mb ang una n IKM	IK M		2	0	2	0	0	1	x x	Pemb angun an IKM	Ju ml ah IK M	0	0	0	0	0	2 IK M	10. 000 .00 0.0 00	2 IK M	10.0 00.0 00.00	2 IK M	10. 000 .00 0.0 00	2 IK M	10. 000 .00 0.0 00	8 IK M	40. 000 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kabu paten Sinta ng
Me mb ang una n Utili tas IKM	Utili tas IK M		2	0	2	0	0	1	x x	Pemb angun an Utilita s IKM	Ju ml ah Utili tita s IK M	0	0	0	0	0	2 IK M	10. 000 .00 0.0 00	2 IK M	10.0 00.0 00.00	2 IK M	10. 000 .00 0.0 00	2 IK M	10. 000 .00 0.0 00	8 IK M	40. 000 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kabu paten Sinta ng
Me ning katn ya	Ka wa san Ind		2	0	2	0	0	1	x x	Pemb angun an Kawa	Ju ml ah ka	0	0	0	0	0	0	0	3 3 3 H	15.0 00.0 00.0	0	0	0	0	3 3 3 H	15. 000 .00	Dis peri nda	Kabu paten Sinta ng

mi	ensi ung gul an dae rah								(UPA KARTI)																			
Me mpr om osik an pro duk IKM	Ev ent pro mo si		2	0	2	0	0	1	x	Promo si Produ k IKM	Ju ml ah ev ent	1 Ev ent	1 E ve nt	10 0. 00 0. 00 0	1 ev e nt	110 .00 0.0 00	1 E ve nt	121 .00 0.0 00	1 E ve nt	133. 100. 000	1 ev e nt	146 .41 0.0 00	1 ev e nt	161 .05 1.0 00	6 ev e n	771 .56 1.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Jakart a
Me mpr om osik an pro duk IKM	Ev ent pa me ran		2	0	2	0	0	1	x	Penye leng garaan Pamer an Kalbar Expo	Ju ml ah ev ent	1 Ev ent	1 ev e nt	10 0. 00 0. 00 0	1 ev e nt	110 .00 0.0 00	1 ev e nt	121 .00 0.0 00	1 ev e nt	133. 100. 000	1 ev e nt	146 .41 0.0 00	1 ev e nt	161 .05 1.0 00	6 ev e nt	771 .56 1.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Prov. Kalba r
Me mpr om osik an	Ev ent pa me ran		2	0	2	0	0	1	x	Penye leng garaan Pamer an	Ju ml ah ev ent	1 Ev ent	1 E ve nt	10 0. 00 0.	1 ev e nt	110 .00 0.0 00	1 E ve nt	121 .00 0.0 00	1 E ve nt	133. 100. 000	1 ev e nt	146 .41 0.0 00	1 ev e nt	161 .05 1.0 00	6 ev e nt	771 .56 1.0 00	Dis peri nda gko	Kalte ng

produk IKM									Kalteng				000											p dan UKM			
Mempromosikan produk IKM	Event pameran		2020016x	07	20616x				Penyelenggaraan Pameran Produk Kerajinan Rakyat	Jumlah event	1 Event	1 event	600000	1 event	66.0000	1 event	72.6000	1 event	79.860.000	1 event	87.84600	1 event	96.630.600	6 event	462.936.600	Dispenda gko p dan UKM	Prov. Kalbar
Membina IKM dalam memperkuat klaster industri	OV OP terben tuk		2020016x	07	20616x				Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah OV OP	0	0	0	0	0	1 ovop	150.0000	0	0	0	0	0	0	1 ovop	150.0000	Dispenda gko p dan UKM	Kec. Kelam Permai

Me mbi na IKM lang sung	Kel om pok IK M Bin aan		2	0	2	0	0	1	x	Pembi naan IKM melalu i pemb inaan langs ung	Ju ml ah kel om pok	10 kel om pok	2 0 ke lo m pok	42 .6 55 .0 00	2 0 ke lo m pok	46. 920 .50 0	2 0 ke lo m pok	46. 920 .50 0	2 0 ke lo m pok	46.9 20.5 00	2 0 ke lo m pok	51. 612 .55 0	2 0 ke lo m pok	51. 612 .55 0	1 2 0 Kel om pok	286 .64 1.6 00	Dis peri nda gko p dan UK M	14 Keca mata n
Me ning katn ya pen get ahu an kelo mp ok pen gola han hasi l pert ania n, per	Kel om pok pen gol aha n has il per tani an, per gola han hasi l pert ania n, per		2	0	2	0	0	1	x	Pelati han ketera mpilan pengo lahan hasil pertan ian, perke bunan , dan perika nan	Ju ml ah kel om pok	0	4 ke lo m pok	30 0. 07 3. 00 0	3 ke lo m pok	235 .00 0.0 00	1 ke lo m pok	150 .00 0.0 00	0	0	0	0	0	0	8 ke lo m pok	685 .07 3.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kec. Sera wai, Kec. Kaya n Hilir, Kec. Binjai Hulu, Ket. Teng ah, Ket Hulu, Kec. Dedai , Kec. Ket Teng

kebu- na- dan peri- kan- an																									ah									
Me- ning- katn- ya pen- get- ahu- an pela- ku- usa- ha DA- MIU	Pel- aku- usa- ha DA- MIU		2	0	2	0	0	1	x	Sosia- lisi- Depot Air Minu- m	ju- ml- ah so- sia- lis- asi	0	0	0	1	x	50. 000 .00 0	0	0	1	x	50.0 00.0 00	0	0	1	x	50. 000 .00 0	3x	150 .00 0.0 00	Dis- peri- nda- gko- p dan UK M	Kabu- paten Sinta- ng			
Mei- ngk- atny- a kem- am- pua- n	Kel- om- pok IK M		2	0	2	0	0	1	x	Pelati- han Indus- tri Keraji- nan Ruma- h	Ju- ml- ah IK M	0	2	IK M	33 .1 49 .0 00	2	IK M	36. 463 .90 0	2	IK M	36. 463 .90 0	2	IK M	36.4 63.9 00	2	IK M	36. 463 .90 0	2	IK M	36. 463 .90 0	1 2 IK M	215 .46 8.5 00	Dis- peri- nda- gko- p dan UK	Kabu- paten Sinta- ng

at ber sain g di Pas ar Glo bal																												
Me nge mb ang kan sist em inov asi tekn olog i indu stri	Kel om pok IK M		2	0	2	0	0	x	x	Penge mban gan Siste m Inovas i Tekno logi Indust ri	Ju ml ah Kel om pok	0	0	0	0	0	5	50. 000 .00 0	5	50.0 00.0 00	5	55. 000 .00 0	5	55. 000 .00 0	2	210 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Kabu paten Sinta ng
Me nye diak an info rma si pro	Pro duk ung gul an		2	0	2	0	0	x	x	Desim inasi Inform asi produ k unggu lan	Ju ml ah ik m	0	0	0	5	150 .00 0.0 00	5	150 .00 0.0 00	5	150. 000. 000	5	150 .00 0.0 00	5	150 .00 0.0 00	2	750 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK	Jakart a

duk ung gula n																								M		
Me mb ekal i IKM ung gula n den gan tekn olog i tep at guna	IK M ung gul an		2 0 7	2 0 6	0 0 1	x x	x x	Desim inasi Inform asi Tekno logi Tepat Guna (TTG)	Ju ml ah IK M	0	0	0	0	0	5 IK M	150 .00 0.0 00	5 IK M	150. 000. 000	5 IK M	150 .00 0.0 00	5 IK M	150 .00 0.0 00	2 0 IK M	600 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Jawa
Me mfa silit asi peni ngk ata n sist	IK M ung gul an		2 0 7	2 0 6	0 0 1	x x	x x	Fasilit asi penin gkata n sistem produ ksi	Ju ml ah IK M	0	0	0	0	0	0	0	5 IK M	150. 000. 000	5 IK M	150 .00 0.0 00	5 IK M	150 .00 0.0 00	1 5 IK M	450 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p dan UK M	Jawa

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengolahan sampah organik	Kelompok pengolahan sampah		207	206	016	xx	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Jumlah mesin pencacah sampah	0	0	0	0	-	0	0	5 unit	1.00 0.00 0.00 0	0	0	0	0	5 unit	1.000.000.000	Dispenda kelompok dan UKM	Kabupaten Sintang
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengolahan	Kelompok pengolahan sampah		207	206	016	xx	Pengadaan Mesin Press Sampah	Jumlah mesin press sampah	0	0	0	0	-	0	0	5 unit	1.00 0.00 0.00 0	0	0	0	0	5 unit	1.000.000.000	Dispenda kelompok dan UKM	Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	2016		2017	
										target	Rp	target	
										(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Jumlah Alat UTTP, Jumlah produk bersertifikat, Jumlah operasi pasar/ pasar murah	2	0	0	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	17,60	17,70		17,80	

			2	0	0	1		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa	15 Sampel	24 Sampel	83.245.200	0	0
			2	0	0	1		Pengawasan Pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengawasan Pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	13 Kec.	14 Kec.	34.244.100	8 Jenis UTTP	37
			2	0	0	1		Monitoring/Pemantauan Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya	13 Kec.	11 Sampel	40.612.650	10 Sampel	44
			2	0	0	1		Pemantauan Produk Wajib Standar Nasional Indonesia	Terlaksananya Pemantauan Produk Wajib Standar Nasional Indonesia	0	0	0	3 Sampel	150
			2	0	0	1		Monitoring dan Pemantauan Produk Kadaluarsa dan kelengkapan Label	Terlaksananya Monitoring dan Pemantauan Produk Kadaluarsa dan kelengkapan Label	0	0	0	30 Pelaku Usaha	113

			2	0	1	1		Pengawasan distribusi penyaluran pupuk dan BBM bersubsidi	Terlaksana Pengawasan distribusi penyaluran pupuk dan BBM bersubsidi	10 Buku	10 Buku	30.173.000	3 Distributor . 12 SPBU	33
			2	0	0	1		Pembentukan BPSK	Terbentuknya BPSK	0	0	0	1 Dok.	147
			2	0	0	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana BPSK	Tersedianya Sarana dan Prasarana BPSK	0	0	0	5 Paket	75
			2	0	0	1		Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	0	0	0	1 Dok.	75
			2	0	0	1		Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen	0	0	0	14 Kelpk.	85
			2	0	0	1		Forum konsumen cerdas	Terciptanya Forum konsumen cerdas	0	0	0	2 kelompok (40 Pelajar)	75

			2	0	0	1		Operasi Pasar	Terlaksananya operasi pasar	0	0	0	4 Kali	101
			2	0	0	1		Pasar Murah (fasilitasi pasar murah)	Terlaksananya Pasar Murah	0	0	0	4 kali	50
			2	0	0	1		Monitoring Harga Sembako	Terlaksananya Monitoring Harga Sembako	0	1 Dok.	62.633.300	48 Kali	68
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah promosi, Jumlah pedagang, Jumlah pasar tertib ukur, Jumlah Alat UTTP	2	0	0	1		Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)					
			2	0	0	1		Pembangunan UPT Metrologi Legal	Terlaksananya Pembangunan UPT Metrologi Legal	0	0	0	1 Unit	8.000
			2	0	0	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal	Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal	0	0	0	1 Paket	800

			2	0	0	1		Sosialisasi Undang-Undang Tentang Metrologi Legal	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Tentang Metrologi Legal	0	0	0	14 Kelpmk.	78
			2	0	0	1		Pendataan Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pendataan Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya	0	0	0	800 UTP	85
			2	0	0	1		Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Terbentuknya pasar tertib ukur	0	0	0	1 pasar	70
			2	0	0	1		Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang	Terlaksananya Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang	0	0	0	14 Kali.	120
			2	0	0	1		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional	50 Buku	1 event	100.472.5000	2 event	250
			2	0	0	1		Penyusunan Prognosa dan Pemantauan Stok sembako	Terlaksananya Penyusunan Prognosa dan Pemantauan Stok sembako	50 Buku/ 47.779.700	0	0	1 Dok.	50

			2	0	0	1		Pendataan Kemitraan	Terlaksananya pendataan kemitraan	0	0	0	210 pelaku usaha	40
			2	0	0	1		Kemitraan (macth making) antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha besar	Terciptanya Kemitraan (macth making) antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha besar	0	0	0	20 pelaku Usaha Mikro	80
			2	0	0	1		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi (Gudang non SRG)	Tersedianya Gudang non SRG	0	0	0	1 Unit	2.000
			2	0	0	1		Pengembangan database informasi potensi unggulan	Terlaksananya Pengembangan database informasi potensi unggulan	0	0	0	14 Dok.	65
			2	0	0	1		Monitoring dan pengawasan perizinan	Terlaksananya Monitoring dan pengawasan perizinan	100 Perusahaan, 14 Buku,	13 Kec, 1 Dok.	50.276.900	14 Dok.	55
			2	0	0	1		Pengawasan, Pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol	0	0	0	14 Kali.	38

			2	0	0	1		Sosialisasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya Sosialisasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	0	0	0	14 Kelompok	40
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pedagang						Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)					
			2	0	0	1		Sosialisasi forum pertemuan perdagangan luar negeri	Terlaksananya Sosialisasi forum pertemuan perdagangan luar negeri	0	0	0	1 kali	50

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Prog	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD	Lokasi
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		

		n				ram (out come) dan Kegi atan (out put)	pad a Tah un Aw al Per enc ana an (20 15)	target		target		target		target		target		periode Renstra PD		Pen ang gun g jawa b			
								Rp	tar ge t	Rp	tar ge t	Rp	tar ge t	Rp	tar ge t	Rp	tar ge t	Rp	tar ge t			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Men jadi kan Pas ar yan g kon dusif dan mod ern seb agai Pilar	Ter wuju dny a peni ngk atan efisi ensi perda ngan dalam	Kon trib usi sektor perda ngan terha dap PD RB, Ju	2	6	18	Program Peningk atan Efisiensi Perdaga ngan Dalam Negeri	Meningk atkan pertum buhan ekonomi															Disp erin dag kop & Ukm	1 4 K e c

							Los																			
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Pasar Kios/Los milik Pemerintah yang memilikikondisi ≤ 40% (Revitalisasi)	Jumlah pasar rakyat	2	6	1	x	2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/Rehabilitasi Pasar Kios/Los	Peningkatan Pasar Kios/Los milik Pemerintah yang memilikikondisi ≤ 40%	2	-	0	4	2.35	2	2.50	2	2.6	2	3.2	2	3.25	12	13.9	Dispersion dagkop & Ukm	14
				8	x					Pasar			Pasar	0.00	Pasar	0.00	Pasar	00.000	Pasar	50.000	Pasar	0.000	Pasar	50.000		Ke

Menyediakan fasilitas pendukung sarana distribusi perdagangan	Pasar Kios /Los milik Pemerintah yang belum dimiliki jaringan listrik	Jumlah pasar rakyat	2	6	18	x	3	Pemasangan jaringan Listrik	Terpasanya jaringan listrik Pasar Kios /Los milik Pemerintah	-	4	Pasar	800.000.00	2	Pasar	400.000.000	2	Pasar	500.000.00	2	Pasar	600.000.00	2	Pasar	650.000.000	14	Pasar	3.350.000	Disperindagkop & Ukm	14	Kec
Menyediakan Kajian Akademik Draft	Pasar Tradisional, Pusat Pembelajaran	Jumlah dokumen	2	6	18	x	4	Penyusunan Kajian Akademik Draft Raperda Peng	Tersedianya dokumen kajian akademik	-	1	Dok	160.000.00	1	Dok	176.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	Dok	336.000.000	Disperindagkop & Ukm	14	Kec	

n dan Pengelolaan Pasar							elolaan Pasar Pemerintah Kab. Sintang.	penataan dan pengelolaan pasar																		
Meningkatkan Pembinaan Penggunaan Fasilitas Pasar Pemerintah	Penggunaan Fasilitas Pasar Pemerintah di Kabupaten Sintang	Jumlah dokumen	2	6	1	x	7	Pembinaan Penggunaan Fasilitas Pasar Pemerintah	Tersedianya laporan pembinaan penggunaan fasilitas pasar pemerintah	-	-	1420.665.900	120orang	156.932.400	120orang	172.625.640	120orang	1890.8804	120orang	2080.87024	120orang	229.764.727	600orang	1.100.753.895	Diserindagkop & Ukm	14Kec

Melakukan Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang	Jumlah dokumen	2	6	18	x	8	Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	Terlaksananya survey rencana pembangunan dan revitalisasi pasar	-	-	0	1	85.000.00	1	850.000	1	850.000	1	85.000.000	1	85.000.00	5	425.000.000	Disperindagkop & Ukm	14	Kec
Meningkatkan kualitas sarpas pasar	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang	Jumlah pasar rakyat	2	6	18	x	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Peminah	Tersedianya fasilitas sarpas pasar	-	1	150.000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	150.000.000	Disperindagkop & Ukm		

Men ingk atka n kuali tas sarp ras pas ar	14 Kec ama tan di Kab upat en Sint ang	Ju mla h pas ar rak yat	2	6	1 8	x	1 0	Penat aan Sara na dan Prasa rana Lingk unga n Pasar Peme rintah	Ters edia nya fasili tas sarp ras pas ar	-	1 P a k e t	3.7 90. 000 .00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 P a k e t	3.79 0.00 0.00 0	Disp erin dag kop & Ukm			
Men etap kan dan Men ata Kaw asa n Sent ra PKL	Kec ama tan di Kab upat en Sint ang yan g me milik i PKL	Ju mla h sen tra	2	6	1 8	x	1 1	Penet apan Kawa san Sent ra Peda gang Kaki Lima (PKL)	Terb ang una n dan Tert atan ya Kaw asa n Sent ra PKL	-	-	-	1 K a w a s a n	1.00 0.00 0.00 0	1 K a w a s a n	1.00 0.00 0.00 0	1 K a w a s a n	1.0 00. 000 .00 0	1 K a w a s a n	1.0 00. 000 .00 0	1 K a w a s a n	1.00 0.00 0.00 0	5 K a w a s a n	5.00 0.00 0.00 0	Disp erin dag kop & Ukm	K a b. Si nt a n g

Menyusun Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolannya	Pemerintah Kabupaten Singang	Jumlah dokumen	2	6	18	x	1	2	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Pasar dan pengelolannya	Tersusunnya Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolannya	-	-	-	1 Paket	75.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Paket	75.000.000	Disperdagkop & Ukm	Kab. Singang
Mendatangi dan menandatangani pedaga	Pedagang menempati pas	Jumlah dokumen	2	6	18	x	1	3	Pendataan dan Pempatan Pedagang Pasar	Tersusunnya data dan penempatan	-	-	-	-	0	-	0	2 Pasar	150.000.000	2 Pasar	165.000.000	2 Pasar	185.000.000	6 Pasar	500.000.000	Disperdagkop & Ukm	Kab. Singang

ng ke pas ar milik pemerintah	ar milik pemerintah						Milik Pemerintah Kabupaten Sintang	ped agang																		
Mel akukan pelayanan retribusi pasar grosir dan pertokoan	Ped agang yang menempati pasar milik pemerintah	Ju mlah ped agang	2	6	1	x	1	Pend ataan dan Pelayanan Restri busi Pasar Grosir dan Perto koan	Terl ayanin ya pelayanan retribusi bagi ped agang	-	-	-	3	80.0	6	120.	8	132	10	145	12	160.	12	637.	Disperin dag kop & Ukm	K a b. Sintang
				8	x	4							Pa sar	00	Pa sar	000	Pa sar	00	Pa sar	00	000	Pa sar	000			

Men ingk atka n kuali tas pela yan an retri busi pas ar gros ir dan pert oko an	Petu gas pela ksa na pela yan an retri busi pas ar gros ir dan pert oko an	Ju mla h dok um en	2	6	1 8	x x	1 5	Peng adaa n Siste m Infor masi Pelay anan Retri busi Pasar Grosi r dan Perto koan	Ters edia nya siste m pen duk ung pela yan an retri busi pas ar gros ir dan pert oko an	-	-	-	-	0	1 Pa ke t	200. 000. 000	-	0	-	0	-	0	1 pa ke t	200. 000. 000	Disp erin dag kop & Ukm	K a b. Si nt a n g
Men jadi kan Pas ar yan g kon dusif	Ter uju dny a pem bina an PKL dan	Ju mla h Ped aga ng Kaki Lim Lim	2	6	1 8	x x	x x	Progr am Pemb inaan Peda gang Kaki Lima dan	Men ingk atka n pert umb uha n eko																Disp erin dag kop & Ukm	K a b. Si nt a n g

dan modern sebagai Pilar Ekonomi	Aso n g a dan Aso n g a n						Ason g a n	nom i																		
Men ingk atka n Kual itas Data PKL dan Aso n g a n, Pen ataa n dan Fasil itasi	PKL yan g ada di Kec ama tan se- Kab upat en Sint ang	Ju mla h PK L dan aso n g a n	2	6	1	x	x	Pend ataan , Penat aan dan Fasil itasi bagi PKL dan Ason g a n di Kab. Sint ang	Ters edia nya lapo ran pen data an, pen ataa n dan fasil itasi PKL dan Aso n g a n	1 Dok	1 Dok & 60 k al i	64.370 .00 0	1 Dok & 98 ka li	70.8 07.0 00	1 Dok % 10 ka li	77.8 87.7 00	1 Dok & 12 ka li	85.676 .47 0	1 Dok & 13 ka li	94.244 .11 7	1 Dok & 14 ka li	103.668. 529	5 Dok & 64 8 ka li	496.653. 816	Disp erin dag kop & Ukm	1 4 K e c

Melakukan Penjualan PKL dan Asongan	PKL dan Asongan di Kabupaten Sintang, yang ada di Kecamatan	Jumlah PKL dan asongan	2	6	18	x	x	Penyuluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan	Tersedianya laporan penyaluhan PKL dan Asongan	-	-	-	3000	70.000	3000	77.000	3000	84.700	3000	93.1700	3000	186.34000	15000	511.210000	Diserindagkop & Ukm	Kec. Stg
TOTAL											8.607.035.900	10.733.739.400	10.632.513.340	9.827.264.674	7.141.291.141	7.434.773.256	54.376.617.711									

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD TAHUN 2016 - 2021

M en ja dik an Ko pe ra si da n U M K M se ba ga i Pe nu nj an g ut a m a Ek on	Terl aks ana nya pen ge mb rang an sist em pen duk ung usa ha bag i UK M	Ju mla h UM KM , Per tum buh an UM KM	1. 1 5. 0 1	1 5 .	Program Pencapa ian iklim usaha yang kondusif pada UMKM	Terla ksan anya kegia tan dala m rangk a penc apaia n iklim usah a yang kond usif bagi UMK M	18 1,8 39	18 2, 06 4	182 ,28 9	182 ,51 4	182 ,73 9	182 ,78 0	182 ,96 5	-					
--	---	--	-------------------------	-------------	--	--	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	--	--	--	--

o mi Pe de sa an																								
						1	Kegia tan Sosia lisasi kebij akan tenta ng UMK M	Juml ah keg / peser ta	-	1 ke g 25 or g	10 0.0 00. 00 0	1 keg 25 org	10 0.0 00. 00 0	1 keg 25 org	10 0.0 00. 00 0	1 keg 25 org	10 0.0 00. 00 0	1 keg 25 org	10 0.0 00. 00 0	6 keg 150 org	600 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S in ta ng	
						2	Kegia tan Pere ncan aan, koord inasi dan peng emban gan UMK	Juml ah keg	-	-	-	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	15 0.0 00. 00 0	5 keg	650 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S in ta ng

							M																
						3	Kegiatan Fasilitas pengembangan UMK M	Jumlah keg	-	-	-	14 keg	25 00.00.000	14 keg	25 00.00.000	14 keg	25 00.00.000	14 keg	25 00.00.000	70 keg	125 00.00.000	Disperindagkop & UKM	Kab. Sintang
		1.1501	1501			4	Kegiatan Fasilitas pembayaaan UMK M dan Koperasi pada Perbanka	Jumlah keg/UMKM	-	-	-	1 keg 30 UM KM	50.00.000	1 keg 30 UM KM	50.00.000	1 keg 30 UM KM	50.00.000	1 keg 30 UM KM	50.00.000	5 keg 150 UM KM	250 00.00.000	Disperindagkop & UKM	Kab. Sintang

							n dan Lemb aga Pem biaya an																		
			1. 1 5. 0 1	1 5 .1 2		5	Kegia tan Monit oring dan evalu asi fasilit as pemb iyaaa n lintas sekto ral	Juml ah keg/o rg	-	-	-	14 keg 40 org	15 0.0 00. 00 0	14 keg 60 org	17 5.0 00. 00 0	14 keg 60 org	18 0.0 00. 00 0	14 keg 60 org	19 0.0 00. 00 0	14 keg 60 org	20 0.0 00. 00 0	70 keg 60 org	795 .00 0.0 00 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S in ta ng

Menjaidikan Kegiatan Perambangan dan Usaha Kecil dan Menengah Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya kegiatan perambangan dan usaha kecil dan menengah	Peraturan Wirusaha	1.1	16501	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pada UMKM																		
---	---	--------------------	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

o mi Pe de sa an	gah																						
						1	Kegiatan fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Jumlah keg/UMKM	-	-	-	1 keg 30 UM KM	15 00.00 00	1 keg 30 UM KM	15 00.00 00	1 keg 30 UM KM	15 00.00 00	1 keg 30 UM KM	15 00.00 00	5 keg 150 UM KM	750 .00 00	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg
						2	Kegiatan Fasilitas kemitraan usaha	Jumlah keg/UMKM			-	1 keg 20 UM KM	12 5.00 00 0	1 keg 20 UM KM	12 5.00 00 0	1 keg 20 UM KM	12 5.00 00 0	1 keg 20 UM KM	12 5.00 00 0	5 keg 20 UM KM	425 .00 00	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg

						7	Kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengembangan UMK M	Jumlah keg/UMKM				-	1 keg 20 UM KM	15 00.00 0	1 keg 20 UM KM	15 00.00 0	1 keg 20 UM KM	15 00.00 0	1 keg 20 UM KM	15 00.00 0	5 keg 100 UM KM	750 .00 00	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg	
						8	Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi dan KUD	Jumlah UMK M	30 UM KM	30 UM KM	65.93 3.9 50	30 UM KM	70.00 00	30 UM KM	90.00 00	30 UM KM	10 00.00 0	30 UM KM	12 00.00 0	30 UM KM	12 5.0 00.00 0	210 UM KM	570 .93 3.9 50	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg

Menjelaskan Kegiatan Perancangan dan UMMK sebagai Penunjang Utama Ekonomi	Terlaksananya pengembangan dan sistem pendukung usaha sebagai UKM	Jumlah UMKM, Pertumbuhan UMKM	1.115.01	17.01		Program Pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM																			
---	---	-------------------------------	----------	-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

o mi Pe de sa an																									
						1	Kegia tan sosial isasi duku ngan infor masi peny ediaan perm odalan perm odalan bagi UMK M	Meni ngkat nya infor masi peny ediaan perm odalan usah a bagi UMK M	14 ke g	14 ke g	12 5.0 00. 00 0	14 keg	12 5.0 00. 00 0	14 keg	15 0.0 00. 00 0	14 keg	17 5.0 00. 00 0	14 keg	20 0.0 00. 00 0	14 keg	22 5.0 00. 00 0	84 keg	1.0 00. 000 .00 0	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg
						2	Kegia tan peng emban ngan klast	Meni ngkat kan kema mpuan	-	-	-	1 keg 30 org	15 0.0 00. 00 0	1 keg 30 org	15 0.0 00. 00 0	1 keg 30 org	15 0.0 00. 00 0	1 keg 30 org	15 0.0 00. 00 0	1 keg 30 org	15 0.0 00. 00 0	5 keg 150 org	750 .00 0.0 00 00	Dis peri nda gko p & UK	K a b. S tg

							er bisnis UMK M	UMK M dala m peng emba ngan klast er bisnis													M				
						3	Kegia tan peng emba ngan saran a pema saran produ k UMK M	Meni ngkat kan saran a pema saran produ k UMK M	-	-	-	1 keg 20 org	13 0.0 00. 00 0	1 keg 20 org	14 0.0 00. 00 0	1 keg 20 org	15 0.0 00. 00 0	1 keg 20 org	16 0.0 00. 00 0	1 keg 20 org	17 5.0 00. 00 0	5 keg 100 org	755 .00 0.0 00 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg
						4	Kegia tan peny eleng garaa n prom	Meni ngkat kan saran a prom osi	3 ke g	3 ke g	45 0.0 00. 00 0	3 keg	45 0.0 00. 00 0	3 keg	45 0.0 00. 00 0	3 keg	45 0.0 00. 00 0	3 keg	45 0.0 00. 00 0	3 keg	45 0.0 00. 00 0	21 keg	2.7 00. 000 .00 0	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg

							osi produ k UMK M	produ k UMK M																	
						5	Kegia tan monit oring dan evalu asi peng elola an dana bergu lir	Juml ah Kope rasi dan UMK M yang dilak ukan monit oring dan evalu asi dana bergu lir	-	-	-	30 UM KM	75. 00 0.0 00	30 UM KM	75. 00 0.0 00	30 UM KM	75. 00 0.0 00	30 UM KM	75. 00 0.0 00	150 UM KM	375 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg		
						6	Kegia tan pema ntaua n peng elola	Juml ah Kope rasi dan Usah a	50 U MK M	50 U M K M	43. 84 1.0 00	50 UM KM	50. 00 0.0 00	50 UM KM	70. 00 0.0 00	50 UM KM	90. 00 0.0 00	50 UM KM	10 0.0 00. 00 0	50 UM KM	12 5.0 00. 00 0	350 UM KM	568 .84 1.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg

nu nj an g ut a m a Ek on o mi Pe de sa an																						
	1	Kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangu	Meningkatkan persamaan persepsi tentang kebijakan dan program	-	1 keg	10000	1 keg	1150000	1 keg	1150000	1 keg	1150000	1 keg	1150000	1 keg	1150000	6 keg	8150000	Dispenda gkop & UKM	Kab. S tg		

							3	Kegiatan Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perasian	Meningkatnya Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perasian	-	-	-	50 Kop era si	15 00. 00 00	50 Kop era si	15 00. 00 00	50 Kop era si	15 00. 00 00	50 Kop era si	15 00. 00 00	50 Kop era si	15 00. 00 00	250 Kop era si	750 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg
							4	Kegiatan sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman	Meningkatnya sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman	-	-	-	20 Kop era si	75. 00 00 00	25 Kop era si	80. 00 00 00	30 Kop era si	10 00. 00 00	40 Kop era si	12 5.0 00. 00 0	50 Kop era si	15 00. 00 00	165 Kop era si	630 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg

							sederhana/mana jemen modern pada jenis usaha koperasi	ologi sederhana/mana jemen modern pada jenis usaha koperasi															
						9	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana usaha koperasi	Meningkatnya sarana dan prasarana usaha koperasi	-	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90	6	5.4	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg

							10	Kegiatan pelatihan perkerasan	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen	-	1	keg 20 kopera	1500.000	1	keg 20 kopera	1500.000	1	keg 20 kopera	1500.000	1	keg 20 kopera	1500.000	1	keg 20 kopera	1500.000	6	keg 120 kopera	900.000	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg
							11	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kualitas Koperasi / KUD	-	-	-	14 dokum en	65.000	14 dokum en	65.000	14 dokum en	65.000	14 dokum en	65.000	14 dokum en	65.000	14 dokum en	65.000	70 dokum en	325.000	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg		

							1 2	Kegiatan pelatihan auditing bagi pengawas koperasi	Meningkatkan pengetahuan personal auditing bagi pengawas koperasi	-	-	-	30 Kop era si	12 6.1 50. 00 0	30 Kop era si	12 6.1 50. 00 0	30 Kop era si	12 6.1 50. 00 0	30 Kop era si	12 6.1 50. 00 0	150 kop era si	630 .75 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg
							1 3	Kegiatan pelatihan akuntansi koperasi	Meningkatnya personal akuntansi bagi pengawas / pengelola koperasi	-	-	-	30 kop era si	10 0.0 00. 00 0	30 kop era si	10 0.0 00. 00 0	30 kop era si	10 0.0 00. 00 0	30 kop era si	10 0.0 00. 00 0	150 kop era si	500 .00 0.0 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg

							14	Kegiatan penilaian pemeringkatan koperasi	Adanya penilaian kualitas kelemagaan koperasi berprestasi	-	-	-	30 kopera si	65.000.00	30 kopera si	80.000.00	30 kopera si	80.000.00	30 kopera si	80.000.00	90.000.00	150 kopera si	450.000.00	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg
							15	Kegiatan pelayanan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	Terlaksananya pelayanan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	-	25 kope rasi	50.000.00	25 kopera si	55.150.00	25 kopera si	55.150.00	25 kopera si	55.150.00	25 kopera si	55.150.00	55.150.00	150 kopera si	325.750.00	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg

						16	Kegiatan pelatihan analisis laporan keuangan	Adanya personal analisis laporan keuangan yang terlihat	-	50	10	50	10	50	10	50	10	300	600	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg
						17	Kegiatan pelatihan penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan)	Meningkatnya personal penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan)	-	25	10	25	10	25	10	25	10	150	600	Disperindagkop & UKM	Kab. Sdg

							Kem en ko p dan UKM	os Kem en ko p dan UKM																	
						2 0	Kegia tan pelak sana an kegia tan hari Kope rasi Nasio nal, Propi nsi dan Kabu paten	Adan ya kegia tan pelak sana an kegia tan hari Kope rasi Nasio nal, Propi nsi dan Kabu paten	-	1 ke g	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	6 keg	900 .00 0.0 00 00	Dis peri nda gko p & UK M	K a b. S tg
						2 1	Kegia tan penin gkata n peran	Meni ngkat nya peran organ isasi		1 ke g	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	1 keg	15 0.0 00. 00 0	6 keg	900 .00 0.0 00 00	Dis peri nda gko p & UK	K a b. S tg

							organisasi gerakan koperasi	gerakan koperasi													M			
						22	Kegiatan pendataan koperasi	Adanya data koperasi yang valid	-	-	-	1700.00	keg buku	1700.00	keg buku	1700.00	keg buku	1700.00	keg buku	53500.00	475.00	Dispendgkop & UKM	Kab. Sdg	
						23	Kegiatan revitalisasi koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi / KUD	-	-	-	6500.00	keg kopera si	16000.00	keg kopera si	6500.00	keg kopera si	6500.00	keg kopera si	53000.00	325.00	Dispendgkop & UKM	Kab. Sdg	
						24	Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap	Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap	-	50	15	50	IUM K	15	50	15	50	IUM K	15	50	300	900.00	Dispendgkop & UKM	Kab. Sdg

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Indikator Kinerja Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Penetapan Kinerja Indikator Kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu capaian.

Untuk indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 6.1.1 berikut ini:

Tabel 6.1.1
INDIKATOR KINERJA DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Wirausahawan	-	1,6	1,77	1,80	1,95	2	2%
2	Jumlah UMKM	-	3800	3850	3932	4007	4050	4050 UMKM
3	Pertumbuhan UMKM	-	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	1,9%
4	Persentase koperasi aktif	-	70,41	70,96	75,5	47,5	50	50%
5	Jumlah BPR / LKM	-	-	-	-	-	-	BPR / LKM
6	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,67	17,69	18,17	17,47	17,50	17,55	17,55%
7	Jumlah Alat UTTP	720	800	880	500	500	1120	1300 Alat
8	Jumlah produk bersertifikat	-	0	30	50	20	20	100 Produk
9	Jumlah pasar tertib ukur	0	0	0	2	0	3	5 Pasar
10	Jumlah operasi pasar/ pasar murah	7	13	21	17	2	5	20 Lokasi

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Jumlah tenaga kontrak	8	16	18	21	23	22	54 Orang
27	Jumlah barang cetak dan penggandaan	62.000 Lembar 4 Jenis	65.000 Lmbr 5 Jenis	65.000 Lmbr 5 Jenis	65.000 Lmbr 5 Jenis	65.000 Lmbr 5 Jenis	65.000 Lmbr 5 Jenis	390.000 Lmbr 30 Jenis
28	Jumlah komponen listrik	5	2	4	4	4	4	22 Jenis
29	Jumlah bahan bacaan	4	4	4	4	4	4	24 Jenis
30	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi	48	51	51	51	51	51	306 Kali
31	Jumlah jasa kebersihan kantor	1	1	1	1	1	1	5 Paket
32	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	1	1	1	1	5 Paket
33	Jumlah mebeler	10	5	10	10	10	10	55 Unit
34	Jumlah komputer dan printer	12	10	10	10	10	10	62 Unit
35	Jumlah peralatan, perlengkapan kantor	12	12	12	12	12	12	72 Unit
36	Jumlah ASN terlatih	10	10	13	14	16	16	16 Orang

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, merupakan pedoman dan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan berfungsi sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karenanya Renstra ini memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, tidak akan dapat memberikan arah dalam penyelenggaraan secara baik jika tidak dipahami secara tepat dan benar tentang substansi, semangat dan maksud yang terkandung di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut Renstra sebagai dokumen perencanaan merupakan amanat pembangunan dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, konsisten, kerjasama dan tanggung jawab dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Dan akhirnya semoga Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang, mampu untuk terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang maju dan mandiri, serta Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Amin.